



**PEMERINTAH KOTA BIMA
TAHUN 2021**

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Kota Bima
Tahun 2020**



KATA PENGANTAR



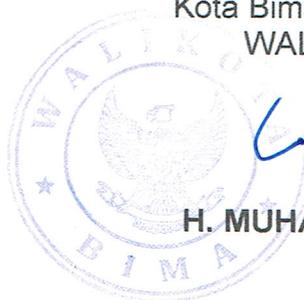
Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Bima Tahun 2020 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bima disusun sesuai Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah selama tahun 2020 dan sebagai bentuk konsistensi kami dalam upaya menciptakan transparansi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 memuat informasi tentang perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Pembangunan Kota Bima periode 2019-2023 yaitu ***mewujudkan Kota Bima yang Berkualitas dan Setara menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri.***

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Bima tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan Pemerintah Daerah, baik dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Kota Bima Tahun 2020.

Demikian LKIP Tahun 2020 kami sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan melimpahkan rahmatNya kepada kita semua menuju pada arah yang lebih baik. Aamiin.

Kota Bima, 18 Maret 2021
WALIKOTA BIMA,



Lutfi
H. MUHAMMAD LUTFI, SE.



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kota Bima Tahun 2020 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan Pemerintah yang baik (*Good Governance*). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bima disusun sesuai Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintah Kota Bima telah menetapkan 16 sasaran dan 18 indikator sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 dan Peraturan Walikota Bima Nomor 51 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Bima Tahun 2020-2023. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran bahwa Pemerintah Kota Bima telah memperoleh predikat kinerja kategori sangat tinggi dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 72,24 % dari 16 sasaran, yang terdiri dari ; (a) 9 sasaran termasuk kategori sangat tinggi, (b) 2 sasaran termasuk kategori tinggi. (c) 1 Sasaran termasuk kategori rendah dan 4 sasaran Kategori sangat rendah.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung adanya kerja sama yang sinergis dari seluruh jajaran Perangkat Daerah dan pihak-pihak yang terkait dengan didukung oleh program dan kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima tahun 2020 sebesar Rp. 736.298.044.130,13 dengan realisasi sebesar Rp. 715.383.787.682,95 atau 97,16 %. Atas pencapaian tersebut, maka Pemerintah Kota Bima tahun 2020 mampu efisiensi anggaran sebesar Rp. 20.914.256.447,14.- atau 2,84%. dengan tingkat pencapaian sangat baik.

Pencapaian kinerja Pemerintah Kota Bima tahun 2020 menunjukkan keberhasilan dalam memenuhi target tahunan sesuai RPJMD 2018-2023. Adapun adanya target yang masih kurang pencapaiannya Pemerintah Kota Bima akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi untuk dilakukan perbaikan di masa mendatang.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSLUSIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum Kota Bima.....	2
1.2.1. Letak Geografis.....	2
1.2.2. Luas Wilayah	3
1.2.3. Topografi.....	3
1.2.4. Kependudukan.....	4
1.2.5. Tata Kelola Pemerintahan	8
1.2.6. Pertumbuhan Ekonomi Kota Bima	17
1.2.7. Potensi Unggulan Daerah.....	20
1.3. Isu Strategis Jangka Menengah.....	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA	29
2.1. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan.....	29
2.2. Prioritas Daerah	34
2.3. Indikator Kinerja Utama Kota Bima	34
2.4. Perjanjian Kinerja.....	37
2.5. Program dan Anggaran.....	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	40
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	41
3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020.....	42
3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan 2020	44
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan Target RPJMD 2018-2023	46
3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan Capain/Standar Provinsi NTB dan Nasional	48
3.1.5. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran	49
3.2. Realisasi Keuangan.....	92



BAB IV PENUTUP	100
----------------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Luas Wilayah Kota Bima per Kecamatan	3
Tabel 1. 2	Kemiringan lahan.....	4
Tabel 1. 3	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020.....	5
Tabel 1. 4	Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Kecamatan Tahun 2020	6
Tabel 1. 5	Jumlah Penduduk menurut struktur usia Tahun 2020	6
Tabel 1. 6	Jumlah Penduduk Menurut Agama	7
Tabel 1. 7	Daftar Perangkat Daerah.....	13
Tabel 1. 8	Daftar Kelurahan Menurut Kecamatan Lingkup Pemerintah Kota Bima Tahun 2020.....	13
Tabel 1. 9	Capaian Sasaran Reformasi Birokrasi.....	15
Tabel 2. 1	Perumusan Penjelasan Visi.....	30
Tabel 2. 2	Perumusan Penjelasan Misi	31
Tabel 2. 3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bima.....	33
Tabel 2. 4	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2019-2023	35
Tabel 2. 5	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bima Tahun 2020.....	38
Tabel 2. 6	Program dan Anggaran Tahun 2020	35
Tabel 3. 1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	42
Tabel 3. 2	Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemerintah Kota Bima Tahun 2020	43
Tabel 3. 3	Rekapitulasi Pencapaian Sasaran.....	44
Tabel 3. 4	Perbandingan Kinerja Tahun 2019 dengan 2020	44



Tabel 3. 5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target RPJMD	46
Tabel 3. 6	Perbandingan realisasi Kinerja dengan Standar/Capaian Provinsi NTB dan Nasional	48
Tabel 3. 7	Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 1	50
Tabel 3. 8	Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 2	52
Tabel 3. 9	Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 3	55
Tabel 3. 10	Skor Pola Pangan Harapan Tahun Konsumsi Pangan Penduduk Kota Bima Tahun 2020.....	59
Tabel 3. 11	Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 4	59
Tabel 3. 12	Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 5	62
Tabel 3. 13	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto pada Harga Pasar Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha taun 2018-2020	63
Tabel 3. 14	Analisis Pencapaian Sasaran 6	65
Tabel 3. 15	Pencapaian Indikator Sasaran 7.....	68
Tabel 3. 16	Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 8	70
Tabel 3. 17	Pencapaian Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Kota Bima Tahun 2014-2020.....	72
Tabel 3. 18	Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 9	75
Tabel 3. 19	PAD Pemerintah Kota Bima Tahun 2015 - 2020	76
Tabel 3. 20	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 10	77
Tabel 3. 21	Pengukuran IKM pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.....	78
Tabel 3. 22	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 11	80
Tabel 3. 23	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 12	82
Tabel 3. 24	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 13	83
Tabel 3. 25	Capaian Pengurangan Kawasan Kumuh Tahun 2017-2020	84



Tabel 3. 26	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 14	85
Tabel 3. 27	Perbandingan kualitas infrastruktur di Kota Bima Tahun 2018-2019	86
Tabel 3. 28	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 15	87
Tabel 3. 29	Analisis Pencapaian Prioritas Indeks Ketahanan Daerah.....	87
Tabel 3. 30	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 16	90
Tabel 3. 31	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	90
Tabel 3. 32	Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Pencapaian	93
Tabel 3. 33	Realisasi Program dan Anggaran Tahun 2020.....	94



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Persebaran Penduduk di Kota Bima Menurut Kecamatan Tahun 2020	5
Gambar 1. 2	Persentase Penduduk Menurut Pendidikan.....	8
Gambar 1. 3	Distribusi sektor lapangan usaha PDRB Kota Bima	19
Gambar 3. 1	Indikasi ketidaksesuaian lahan Tahun 2020	80
Gambar 3. 2	Sebaran titik lokasi indikasi ketidaksesuaian lahan Tahun 2020	81

**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1. 1	Jumlah PNS Lingkup Pemerintah Kota Bima Tahun 2020.....	14
Grafik 3. 1	Perbandingan AHH Kota Bima , AHH Provinsi NTB dan AHH Nasional Tahun 2016-2020.....	51
Grafik 3. 2	Perbandingan Indeks Pendidikan Kota Bima dengan Provinsi NTB dan Nasional.....	53
Grafik 3. 3	Perbandingan Indeks Pendidikan Kota Bima selama Tahun 2015-2020	53
Grafik 3. 4	Perbandingan Pengeluaran Perkapita/bulan Penduduk Kota Bima Tahun 2017- 2020.....	56
Grafik 3. 5	Perbandingan Pengeluaran Perkapita/bulan Penduduk Kota Bima dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2020	56
Grafik 3. 6	Skor PPH Kota Bima Tahun 2017-2020	61
Grafik 3. 7	Perbandingan Pertumbuhan PDRB Kota Bima Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2020.....	63
Grafik 3. 8	Laju pertumbuhan PDRB 2020 Kabupaten Kota Di NTB Tahun 2020	64
Grafik 3. 9	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Bima dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2020.....	66
Grafik 3. 10	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin di Kota Bima dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2015 – 2020.....	67
Grafik 3. 11	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota,Provinsi dan Nasional Tahun 2020	69
Grafik 3. 12	Perolehan PAD Pemerintah Kota Bima Tahun 2015-2020.....	76
Grafik 3. 13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2018-2020	82
Grafik 3. 14	Luas Kawasan Kumuh di Kota Bima Tahun 2017-2020.....	84



Grafik 3. 15	Perbandingan angka kriminalitas Kota Bima dengan Kabupaten/Kota dan Provinsi NTB Tahun 2020	91
Grafik 3. 16	Angka Kriminalitas Kota Bima Tahun 2016-2020	91



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut pelaporan kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun



anggaran berakhir, serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan LKIP Tahun 2020 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian LKIP Kota Bima Tahun 2020 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Walikota kepada Presiden ini disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2020.

1.2. Gambaran Umum Kota Bima

1.2.1. Letak Geografis

Secara geografis, Kota Bima terletak pada koordinat $8^{\circ}20'$ - $8^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan antara $118^{\circ}41'$ - $118^{\circ}48'$ Bujur Timur , dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima
- Sebelah Timur : Kecamatan Wawo Kabupaten Bima
- Sebelah Selatan : Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima



- Sebelah Barat : Teluk Bima

1.2.2. Luas Wilayah

Secara keseluruhan Kota Bima memiliki luas wilayah 222,25 Km² mencakup 5 (lima) kecamatan dan 41 (empat puluh satu) kelurahan. Rincian luas wilayah berdasarkan masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1. 1 Luas Wilayah Kota Bima per Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
1.	Rasanae Barat	10,14
2.	Rasanae Timur	64,07
3.	Asakota	69,03
4.	Raba	63,73
5.	Mpunda	15,28
Jumlah		222,25

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan SETDA Kota Bima

Jika dilihat dari luas wilayah bahwa Kecamatan Asakota sebagai kecamatan yang memiliki luas wilayah paling besar yaitu 69,03 km² sedangkan wilayah yang memiliki luas paling kecil adalah Kecamatan Rasanae Barat yaitu 10,14 km².

1.2.3. Topografi

Kota Bima didominasi oleh lahan dengan kemiringan datar dengan kelerengn 0-40 %, yaitu seluas 9.242 ha, kemudian lahan bergelombang seluas 4.994 ha, lahan dengan kemiringan curam seluas 4.534 ha, dan lahan dengan kondisi sangat curam



dengan luas 2.957 ha. Rincian kemiringan lahan berdasarkan kecamatan dapat dilihat tabel 1.2 berikut.

Tabel 1. 2 Kemiringan lahan

No	Kecamatan	Datar (0 - 2 %)	Bergelombang (2 - 15 %)	Curam (15 - 40 %)	Sangat Curam (> 40 %)
1.	Rasanae Barat	854	35	75	50
2.	Rasanae Timur	2.555	1.793	935	1.024
3.	Asakota	2.225	1.184	2.113	1.081
4.	Raba	2.950	1.850	848	627
5.	Mpunda	658	132	563	175
Jumlah		9.242	4.994	4.534	2.957

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Bima

Pada umumnya semua kecamatan di Kota Bima didominasi oleh wilayah yang relatif datar dan bergelombang. Namun, ada 2 (dua) wilayah yang masih memiliki kemiringan sangat curam yaitu Kecamatan Asakota dan Kecamatan Rasanae Timur memiliki kelerengan lebih dari 40% mencapai 34-36 persen. Luas Kecamatan Raba dengan kemiringan diatas 40% mencapai 21 persen. Sementara dua kecamatan lain (Kecamatan Rasanae Barat dan Mpunda) kemiringan diatas 40% hanya berkisar 1-6 persen.

1.2.4. Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Bima pada Tahun 2020 sebanyak 173.031 jiwa terdiri atas 84.883 jiwa penduduk laki-laki dan 88148 jiwa penduduk perempuan. Penduduk Kota Bima mengalami pertumbuhan sebesar 1,95 % dibanding Tahun

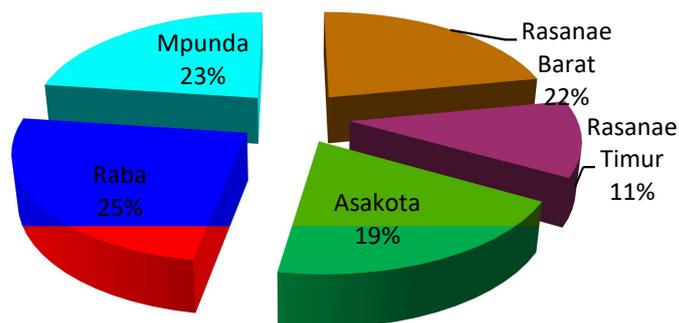
2019 sebesar 149.498 jiwa. Kepadatan penduduk di Kota Bima Tahun 2020 mencapai 778 jiwa/km², sebagaimana terlihat pada tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Rasanae Barat	10,14	37.774	3.725
2	Mpunda	15,28	39.439	2.581
3	Rasanae Timur	64,07	19.666	307
4	Raba	63,73	42.287	664
5	Asakota	69,03	33.865	491
Jumlah		222,25	173.031	779

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima

Jika dilihat jumlah penduduk menurut kecamatan, penduduk terbesar berada di Kecamatan Raba sebesar 42.287 jiwa, dan yang terendah berada di kecamatan Rasanae Timur sebesar 19.666 jiwa. Rincian jumlah penduduk menurut kecamatan dapat dilihat pada gambar 1 dan tabel 1.4 berikut.



Gambar 1.1 Persebaran Penduduk di Kota Bima Menurut Kecamatan Tahun 2020

Tabel 1. 4 Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Penduduk		Jumlah Penduduk
		L	P	
1	Rasanae Barat	18.531	19.243	37.774
2	Mpunda	19.347	20.092	39.439
3	Rasanae Timur	9.647	10.019	19.666
4	Raba	20.746	21.541	42.287
5	Asakota	16.612	17.253	33.865
Jumlah		84.883	88.148	173.031

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima

Struktur penduduk Kota Bima didominasi oleh penduduk yang berusia usia dibawah 40 Tahun. Komposisi penduduk menurut usia akan mempengaruhi kebijakan pembangunan kota. Keterkaitan komposisi penduduk dengan upaya-upaya pembangunan kota yang dilaksanakan, didasarkan kepada kebutuhan pelayanan yang harus disediakan kepada masing-masing kelompok penduduk, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan bahkan pelayanan kesejahteraan sosial lainnya. Komposisi penduduk Kota Bima menurut Struktur Usia dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut.

Tabel 1. 5 Jumlah Penduduk menurut struktur usia Tahun 2020

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
00-04	8.182	7.814	15.996
05-09	8.145	8.006	16.151
10-14	8.005	7.785	15.790
15-19	8.586	8.763	17.349
20-24	9.607	9.266	18.873
25-29	7.308	6.851	14.159
30-34	6.339	6.858	13.197
35-39	5.572	6.179	11.751
40-44	5.348	6.312	11.660

45-49	4.750	5.230	9.980
50-54	3.854	4.195	8.049
55-59	3.072	3.553	6.625
60-64	2.071	2.494	4.565
65-69	1.636	1.777	3.413
70-74	1.075	1.281	2.356
≥ 75	1.333	1.784	3.117
Jumlah	84.883	88.148	173.031

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima

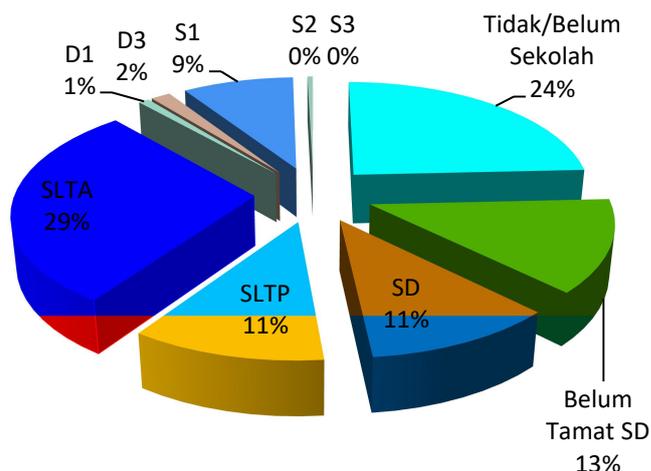
Penduduk Kota Bima mayoritas beragama islam yaitu berjumlah 98,90 %. Kerukunan antar umat beragama sangat baik sehingga konflik antar agama tidak pernah terjadi di Kota Bima. Rincian jumlah penduduk menurut agama dapat dilihat tabel 1.6.

Tabel 1. 6 Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah (jiwa)	Persentase
1	Islam	171.130	98,90%
2	Protestan	938	0,54%
3	Katolik	683	0,39%
4	Hindu	258	0,15%
5	Budha	22	0,01%
Jumlah		173.031	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima

Jumlah penduduk di Kota Bima pada Tahun 2019 jika dilihat dari tingkat pendidikan, diketahui bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan SLTA/ sederajat memiliki jumlah paling besar yaitu 43.287 orang atau 29 %. Selengkapnya jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Kota Bima pada Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar 2 berikut.



Gambar 1. 2 Persentase Penduduk Menurut Pendidikan

1.2.5. Tata Kelola Pemerintahan

a. Pembentukan Kota Bima sebagai Daerah Otonom

Pemerintah Kota Bima dibentuk menjadi Daerah Otonom melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, Kota Bima merupakan pusat Pemerintahan Kesultanan yang pernah mengalami masa keemasan sekitar kurun waktu 1933 M hingga 1951 M yang diperintah oleh 14 Sultan Bima. Selanjutnya memasuki era kemerdekaan Indonesia, Kesultanan Bima memilih bergabung berada dalam wilayah NKRI sehingga berubah dari Pemerintah Kesultanan Bima menjadi Pemerintah Swapraja Bima dengan pusat pemerintahan di Kota Bima.

Kemudian pada era Indonesia Serikat, Kota Bima

tetap menjadi pusat Pemerintahan Daerah Swatantra Tingkat II Bima. Kemudian pada Tahun 1958 Pemerintah Swatantra Tingkat II Bima berubah menjadi Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dan tetap menjadikan Kota Bima sebagai ibukota Kabupaten Bima setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Propinsi NTB dan Undang-Undang nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Se-Propinsi Bali, NTB, dan NTT.

Seiring dengan kebutuhan dan perkembangan Kota Bima, baik sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, politik, sosial dan budaya, maka Kota Bima sejak Tahun 1998 telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai salah satu Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1998 tentang pembentukan Kota Administratif sebagaimana telah dituangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 178, tanggal 22 Oktober 1998. Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi seluruh masyarakat, maka DPRD Kabupaten Bima melalui serangkaian proses persidangan akhirnya pada tanggal 22 Pebruari 2001 mengeluarkan keputusannya tentang persetujuan peningkatan status Pemerintah Administratif Bima menjadi Pemerintah Kota

Bima, dan kemudian pada tanggal 23 Pebruari 2001 Pemerintah Kabupaten Bima mengirim surat tentang usulan peningkatan status Pemerintah Administratif Bima menjadi Pemerintah Kota Bima kepada Gubernur NTB dan DPRD NTB untuk diusulkan ke Pemerintah Pusat. Akhirnya tepat tanggal 10 April 2002 Pemerintah Kota Bima terbentuk menjadi Daerah Otonom melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

b. Kedudukan dan Kewenangan

Dengan diberlakukannya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih menekankan aspek desentralisasi yang diberikan dalam wujud otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Berkaitan dengan otonomi daerah dalam pelaksanaannya di Kota Bima dapat dijelaskan melalui 2 (dua) aspek, yaitu:

1) Aspek politik

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kota Bima dari aspek politik ditandai dengan program legislatif dalam membahas perubahan atas peraturan tentang struktur organisasi dan tata kerja dan kegiatan partai politik tingkat daerah dan DPRD sebagai mitra pemerintah daerah.

2) Administrasi

Pemerintah Kota Bima dalam melaksanakan otonomi daerah secara administratif diawali dengan melakukan identifikasi kewenangan pemerintah daerah, penataan kelembagaan, penempatan personil, pengelolaan sumber keuangan daerah, pengelolaan sarana dan prasarana (aset daerah), dan manajemen pelayanan publik. Pemerintah Kota Bima menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebanyak 25 urusan wajib untuk menyelenggarakan pelayanan dasar pemerintahan dan 6 urusan pilihan, terdiri dari :

- 1) Pendidikan
- 2) Kesehatan
- 3) Lingkungan Hidup
- 4) Pekerjaan Umum
- 5) Penataan Ruang
- 6) Perencanaan Pembangunan
- 7) Perumahan
- 8) Kepemudaan dan Olahraga
- 9) Penanaman Modal
- 10) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- 11) Kependudukan dan Catatan Sipil

- 12) Ketenagakerjaan
- 13) Ketahanan Pangan
- 14) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 15) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- 16) Perhubungan
- 17) Komunikasi dan Informatika
- 18) Pertanahan
- 19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
- 20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
- 21) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 22) Sosial
- 23) Kebudayaan
- 24) Kearsipan, dan
- 25) Perpustakaan

sedangkan urusan pilihan terdiri dari :

- 1) Kelautan dan Perikanan
- 2) Pertanian
- 3) Pariwisata
- 4) Industri
- 5) Perdagangan, dan

6) Ketransmigrasian.

c. Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Walikota Bima dibantu oleh Perangkat Daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Bima bahwa perangkat daerah Kota Bima berjumlah 34, dengan rincian sesuai tabel 1.7 dan 1.8 berikut:

Tabel 1. 7 Daftar Perangkat Daerah

Staf Ahli Walikota	Sekretariat Daerah	Sekretariat DPRD	Inspektorat	Badan-Badan Daerah	Dinas-Dinas Daerah	Kecamatan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik. 2. Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. 3. Staf Ahli Walikota Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kemasyarakatan dan SDM. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial <ol style="list-style-type: none"> a. Bagian Administrasi Pemerintahan. b. Bagian Kesejahteraan Rakyat. c. Bagian Hukum 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan <ol style="list-style-type: none"> a. Bagian Perekonomian. b. Bagian APP. c. Bagian LPBJ. 3. Asisten Administrasi Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Bagian Organisasi. b. Bagian Umum. c. Bagian Humas dan Protokol. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Hukum dan Persidangan. 2. Bagian Umum, Humas dan Protokol. 3. Bagian Keuangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris 2. Inspektur Pembantu I. 3. Inspektur Pembantu II 4. Inspektur Pembantu Investigasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAPPEDA dan LITBANG 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Badan Kepegawaian dan PSDM 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Satpol PP 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4. Dinas Kesehatan 5. Dinas PU dan Penataan Ruang 6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 7. Dinas Sosial 8. Dinas Tenaga Kerja 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA 10. Dinas Ketahanan Pangan 11. Dinas Lingkungan Hidup 12. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 13. Dinas Perhubungan 14. Dinas Komunikasi dan Informatika 15. Dinas Statistik Daerah 16. Dinas Koperindag 17. Dinas Penanaman Modal dan PTSP 18. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 19. Dinas Kelautan dan Perikanan 20. Dinas Pariwisata 21. Dinas Pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Asakota 2. Kecamatan Rasanae Barat 3. Kecamatan Mpunda 4. Kecamatan Rasanae Timur 5. Kecamatan Raba

Tabel 1. 8 Daftar Kelurahan Menurut Kecamatan Lingkup Pemerintah Kota

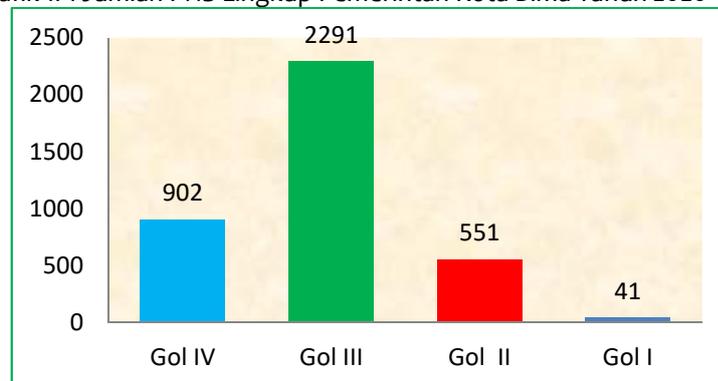
Bima Tahun 2020

Kecamatan Asakota	Kecamatan RasanaE Barat	Kecamatan RasanaE Timur	Kecamatan Mpunda	Kecamatan Raba
1. Kelurahan Jatibaru	1. Kelurahan Dara	1. Kelurahan Dodu	1. Kelurahan Lewirato	1. Kelurahan Kendo
2. Kelurahan Kolo	2. Kelurahan NaE	2. Kelurahan Kodo	2. Kelurahan Mande	2. Kelurahan PenanaE
3. Kelurahan Jatiwangi	3. Kelurahan Pane	3. Kelurahan Kumbo	3. Kelurahan Manggemaci	3. Kelurahan Penaraga
4. Kelurahan Jatibaru Timur	4. Kelurahan Paruga	4. Kelurahan Lampe	4. Kelurahan Matakando	4. Kelurahan Rabadompu Timur
5. Kelurahan Melayu	5. Kelurahan Sarae	5. Kelurahan Lelamase	5. Kelurahan Monggonao	5. Kelurahan Rabadompu Barat
6. Kelurahan Ule	6. Kelurahan Tanjung	6. Kelurahan Nungga	6. Kelurahan SambinaE	6. Kelurahan Rabangodu Selatan
		7. Kelurahan Oi Fo'o	7. Kelurahan Santi	7. Kelurahan Rabangodu Utara
		8. Kelurahan Oimbo	8. Kelurahan Panggi	8. Kelurahan Rite
			9. Kelurahan Sadia	9. Kelurahan Rontu
			10. Kelurahan Penatoi	10. Kelurahan Nitu
				11. Kelurahan Ntobo

d. SDM Aparatur

Dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan mempermudah pelaksanaan pelayanan publik saat ini Pemerintah Kota Bima Tahun 2020 telah memiliki PNS sebanyak 3.618 (*Tiga Ribu Enam Ratus Delapan belas*) orang terdiri dari laki-laki 1676 orang dan Perempuan 1942 Orang.

Grafik 1. 1 Jumlah PNS Lingkup Pemerintah Kota Bima Tahun 2020



e. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Bima telah berjalan secara lancar, dengan tingkat capaian sasaran pada masing-masing indikator sebagaimana pada tabel 1.9 berikut.

Tabel 1. 9 Capaian Sasaran Reformasi Birokrasi

Sasaran Reformasi Birokrasi	Indikator	Baseline (2020)	Target (2024)
1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.	a. Opini WTP atas laporan keuangan.	WTP	WTP
	b. Level kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).	III	IV
	c. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP.	II	IV
	d. Instansi pemerintah yang akuntabel (Skor B atas SAKIP).	B (67,05)	A (85,00)
	e. Penggunaan e- <i>Procurement</i> terhadap belanja pengadaan barang dan jasa melalui Sistem pengadaan secara elektronik (SPSE).	99 %	100 %
2. Birokrasi yang Efektif dan Efisien	a. Indeks Reformasi Birokrasi	-	-
	b. Indeks Profesionalitas ASN	-	-
	c. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	C (2,6)	A (3,0)
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.	a. Indeks kepuasan masyarakat	B 77,54	A (88,50)
	b. Persentase kepatuhan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait pelayanan publik (Zona Hijau).	89,43	95

Sasaran Reformasi Birokrasi	Indikator	Baseline (2020)	Target (2024)
	c. Indeks Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sangat Tinggi (3,1845)	Sangat Tinggi (3,2300)
	c. Indeks inovasi daerah	Inovatif 890	Sangat Inovatif 1500

1.2.6. Pertumbuhan Ekonomi Kota Bima

Perekonomian Kota Bima ditunjang dari berbagai sektor, diantaranya jasa, perdagangan, pertanian dan pariwisata. Kota Bima merupakan satu-satunya kota di Pulau Sumbawa Provinsi NTB. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bima pada Tahun 2019 yaitu sebesar 5,22%, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi NTB yang sebesar 4,01%.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bima

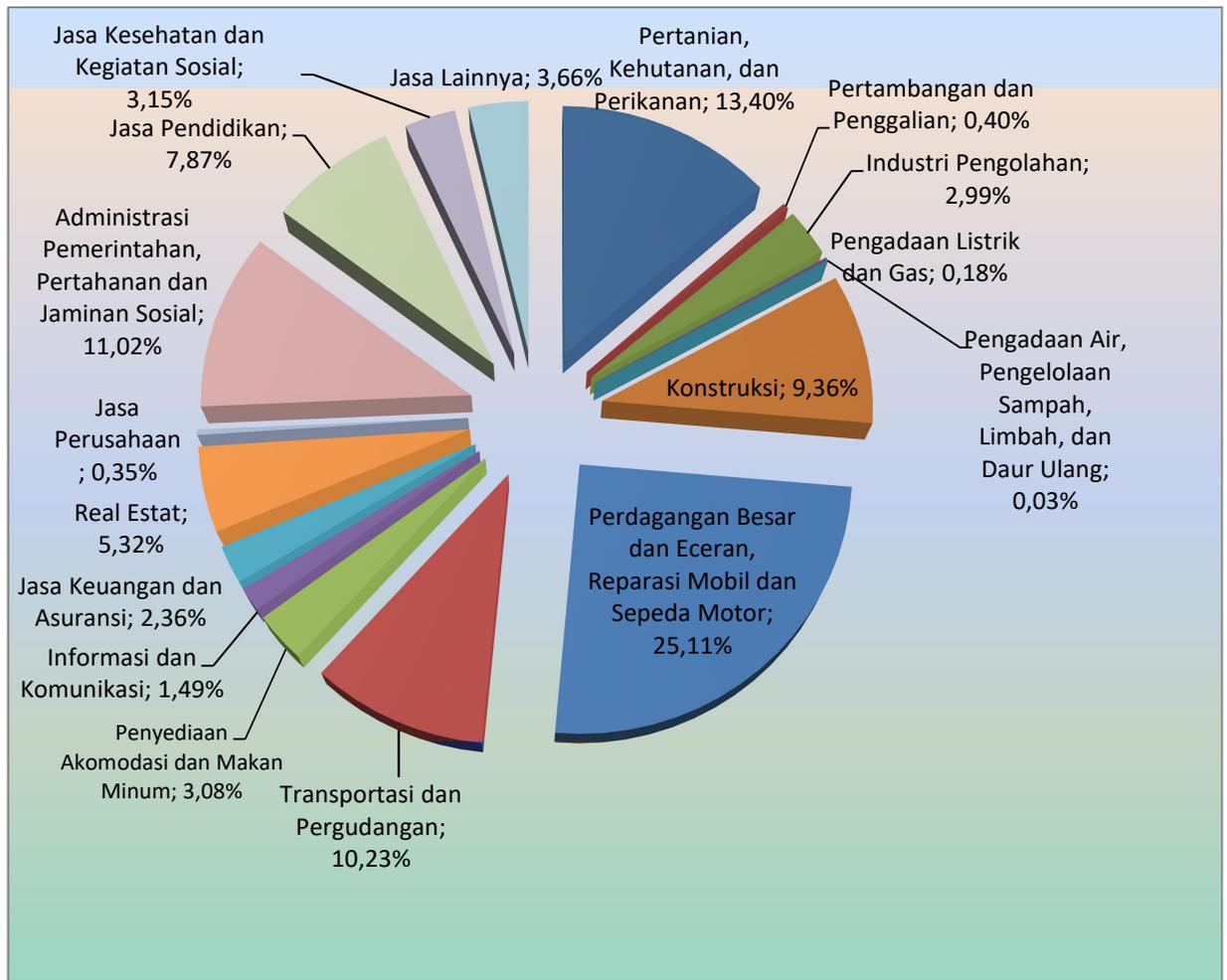
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan salah satu indikator yang menghitung jumlah nilai tambah yang terjadi diseluruh sektor ekonomi yang beroperasi pada periode tertentu di suatu wilayah. Dalam hal ini angka PDRB tersedia atas dasar harga berlaku dan juga atas dasar harga konstan. Di Tahun 2019 besaran nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga berlaku telah mencapai 4.274 milyar rupiah, Angka tersebut meningkat setiap tahunnya dengan peningkatan diatas 10 persen atau dengan besaran rata-rata 322 milyar pertahunnya dalam kurun waktu 3 Tahun terakhir.

Pada besaran nilai PDRB atas dasar harga konstan terjadi penambahan 145 milyar dari tahun sebelumnya yang

menjadikan nilai PDRBnya menjadi sebesar 3.032 milyar rupiah pada Tahun 2019.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Bima pada Tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan. Peranan dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor yaitu mencapai 24,93 persen (angka ini meningkat dari 24,42 persen di Tahun 2018). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,31 persen (turun dari 13,48 persen di Tahun 2018).

Dari distribusi tersebut terlihat bahwa sampai dengan Tahun 2019 ini, perekonomian Kota Bima masih sangat tergantung pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sehingga apabila sektor ini terganggu, akan berdampak besar terhadap perekonomian di Kota Bima. Distribusi sektor lapangan usaha dapat dilihat pada gambar



Gambar 1. 3 Distribusi sektor lapangan usaha PDRB Kota Bima

b. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat stabilitas perekonomian suatu daerah dengan melihat perubahan harga barang/jasa yang umum dikonsumsi masyarakat. Tingkat inflasi/deflasi menggambarkan daya beli masyarakat. Semakin tinggi inflasi, maka semakin rendah nilai uang dan semakin rendah daya beli masyarakat.

inflasi di Kota Bima lebih tinggi dari inflasi Provinsi NTB dan Inflasi Nasional kecuali Tahun 2019. Besaran nilai inflasi dari 2017 ke 2018 mengalami peningkatan yang artinya terjadi peningkatan daya beli masyarakat di Tahun 2018 dibandingkan Tahun 2018. Pada Tahun 2021 nilai inflasi kembali mengalami penurunan walaupun tidak signifikan seperti Tahun 2018.

1.2.7. Potensi Unggulan Daerah

a. Pertanian

Sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam perekonomian Kota Bima serta masih menjadi salah satu mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk di Kota Bima. Peranan sektor pertanian di Kota Bima masih cukup penting, karena kontribusinya dalam pembentukan PDRB menempati posisi kedua terbesar, yakni mencapai angka 13,40 persen pada Tahun 2019.

Pada Tahun 2019, luas panen tanaman pangan di Kota Bima mencapai 15.160,1 hektar. Diantara tanaman pangan tersebut, jagung menjadi komoditas dengan luas panen terbanyak, yang mencapai 8.492,2 hektar atau setara dengan 56 persen dari total luas panen tanaman padi dan palawija di Kota Bima. Kemudian disusul oleh padi sawah, padi lading, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan kacang hijau.

Tingginya luas panen jagung tidak lain disebabkan oleh semakin tingginya minat petani untuk menanam jagung. Hal tersebut didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah diantaranya program pembukaan lahan, harga komoditas jagung yang dijaga, serta kemudahan lainnya seperti subsidi pupuk dan bibit. Selain itu, kondisi daratan Kota Bima yang cenderung kering dan hanya mengandalkan tadah hujan juga sangat cocok untuk menanam jagung

b. Perdagangan

Sektor perdagangan memiliki posisi penting dalam perekonomian Kota Bima. Kegiatan perdagangan di Kota Bima tidak hanya melayani kebutuhan penduduk lokal, tapi juga bagi penduduk wilayah sekitarnya. Ketersediaan infrastruktur yang menunjang sektor perdagangan, seperti pelabuhan dan pusat perdagangan menjadikan Kota Bima menjadi pusat arus distribusi barang dan jasa. Adapun perkembangan perusahaan perdagangan di Kota Bima menunjukkan tren yang cukup menggembirakan.

Kawasan perdagangan di Kota Bima terdapat di Kecamatan Rasanae Barat, di mana di kawasan ini terdapat Pasar Raya, dan kawasan pertokoan. Skala pelayanan kawasan perdagangan di Kecamatan Rasanae Barat

adalah skala regional. Selain itu kawasan perdagangan juga terdapat di Kecamatan Raba, yaitu dengan adanya Pasar Raba, Pasar Penaraga dan Pasar Kumbe. Kemudian di Kecamatan Asakota terdapat Pasar Jatibaru, namun skala pelayanannya masih lokal dan terbatas pada wilayah sekitar pasar tersebut.

Selama 5 Tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang lebih dari 23 persen dari Total PDRB Kota Bima. Pada Tahun 2019, kontribusi kategori ini mencapai lebih dari satu triliun rupiah atau sekitar 25,11 persen dari total PDRB. Dari nilai tersebut, sekitar 77 persen merupakan sumbangan dari subkategori Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor sedangkan 23 persen merupakan sumbangan dari subkategori Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya.

Sektor perdagangan, reparasi mobil dan motor dari Tahun 2016 hingga 2017 terus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan sector perdagangan tertinggi pada Tahun 2017 yaitu meningkat sebesar 8,55 persen dari Tahun sebelumnya, sedangkan pertumbuhan terendah sebesar 5,99 persen pada Tahun 2018. Dilihat dari

kecenderungannya, pertumbuhan sector perdagangan cenderung mengalami peningkatan kecuali pada Tahun 2018 sektor perdagangan mengalami perlambatan pertumbuhan. Hal ini tidak mempengaruhi persentase nilai perdagangan sebagai penyumbang terbesar dari total PDRB Kota Bima

c. Pariwisata

Potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kota Bima meliputi wisata budaya dan wisata alam. Namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, di mana saat ini masih terbatas pada wisatawan lokal. Jika dilihat secara geografis, posisi Kota Bima berada di antara dua kawasan yang menjadi tujuan wisata, yaitu Pulau Lombok di sebelah barat dan Pulau Komodo di sebelah timur. Sehingga secara geografis Kota Bima sangat berpotensi untuk mengembangkan sektor pariwisatanya mengingat letak wilayah yang cukup strategis. Beberapa obyek wisata yang ada di Kota Bima secara sekilas dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Istana Kayu *Asi Bou*

Istana ini terletak di samping timur Istana Bima (sekarang Museum *Asi Mbojo*). Dinamakan *Asi Bou* karena didirikan setelah pendirian Istana Bima pada

Tahun 1927, tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Ibrahim (1881-1936). *Asi Bou* dibangun untuk Putera Mahkota Muhammad Salahuddin.

2) Museum Asi Mbojo

Museum Asi Mbojo dulunya merupakan Istana bagi Raja dan Sultan Bima. Museum ini dikonstruksi dengan campuran gaya Eropa dan Bima pada Tahun 1927 oleh Mr.Obzicshteer Rehata. Lokasinya berada di pusat kota dan mudah diakses. Di Museum ini terdapat silsilah/tata urutan Raja dan Kesultanan Bima, benda tata urutan kepangkatan pemerintahan, barang-barang serta pakain adat yang digunakan Istana Kerajaan, para prajurit serta masyarakat pada jaman itu. Selain itu juga dipamerkan benda-benda yang tidak hanya berasal dari jaman kerajaan dan kesultanan, tetapi juga benda-benda purbakala sebelum masa kerajaan dan kesultanan Bima.

3) Museum *Samparaja*

Museum ini terletak di Jalan Gajah Mada Kelurahan Moggonao Kota Bima. Koleksi yang ada di museum ini antara lain Kitab BO yang asli, kitab yang membahas ihwal Kerajaan Bima pada abad 14 Masehi. Selain itu terdapat benda-benda peninggalan kesultanan Bima.

4) Pantai Lawata

Pantai Lawata merupakan salah satu tempat tujuan wisata utama bagi masyarakat Kota Bima. Di kawasan pantai ini pengunjung dapat menikmati berbagai makanan khas Kota Bima dan melakukan aktifitas olahraga seperti berenang.

5) Pantai Amahami

Pantai Amahami juga merupakan tempat tujuan bagi masyarakat Kota Bima untuk berwisata. Kawasan pantai ini ramai terutama pada sore dan malam hari, dengan berbagai aktifitas yang ada seperti pedagang kaki lima. Pantai ini berdekatan dengan Pantai Lawata atau berada sebelum Pantai Lawata dari arah Terminal Dara. Selain pantai-pantai tersebut, di kawasan pesisir Teluk Bima masih terdapat obyek-obyek wisata yang menarik untuk dikunjungi, seperti Pantai Kolo dan Pantai So Ati.

6) Pantai Kolo

Pantai ini terletak di kawasan Perairan Kolo. Kapal-kapal laut yang hendak menuju Pelabuhan Bima harus melalui Perairan Kolo yang merupakan satu-satunya pintu masuk menuju pelabuhan Bima. Selain ramai

dikunjungi para pelancong, pantai ini juga menawarkan panorama dan keindahan alamnya.

1.3. Isu Strategis Jangka Menengah

Berdasarkan isu-isu strategis pembangunan Kota Bima yang menjadi perhatian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut.

1. Isu strategis tentang peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat.

Peningkatan kualitas melalui pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan pendapatan penduduk. Isu strategis pada bidang kesehatan meliputi: kasus gizi buruk, kesehatan Ibu hamil, kesehatan Ibu melahirkan, kesehatan bayi, *stunting*, kualitas pelayanan berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana, kesehatan, keterbatasan dokter spesialis dan tenaga kesehatan yang berkompeten. Sedangkan isu strategis pada bidang pendidikan meliputi: keterjangkauan pelayanan pendidikan yang berkaitan dengan akses dan pembiayaan, Pendidikan Anak Usia Dini, penuntasan pendidikan dasar, dan peningkatan tata kelola layanan lembaga pendidikan.

2. Isu strategis tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat berkaitan erat dengan persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan

harus dipandang sebagai kondisi yang tidak saja berkaitan dengan ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar, perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani hidupnya secara bermartabat. Pada aspek pembangunan ekonomi, meskipun menunjukkan pertumbuhan setiap Tahunnya, sektor-sektor unggulan dan produktif belum berkembang dan memberikan nilai tambah secara optimal pada pendapatan masyarakat. Sektor pariwisata maupun industri kreatif pada dasarnya sangat potensial untuk dikembangkan mengingat kekayaan budaya maupun komoditi produk unggulan yang kita miliki.

3. Isu strategis tentang peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Isu tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Bima mencakup: perencanaan kinerja yang berkualitas, kualitas pengawasan dan kapabilitas APIP, akuntabilitas kinerja dan keuangan, peningkatan kapasitas dan profesionalisme ASN, peningkatan kualitas pelayanan publik (perijinan, administrasi kependudukan, kesehatan dan pendidikan).

4. Isu pembangunan Infrastruktur perkotaan dan penataan ruang yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana.

Beberapa isu strategis pada aspek ini meliputi: kemantapan jalan dan jembatan, pelayanan air bersih, *backlog* perumahan,

penuntasan kawasan kumuh, kesenjangan pembangunan wilayah timur dan barat, ketaatan terhadap RTRW dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Pelayanan informasi rawan bencana, dan ketangguhan wilayah terhadap resiko bencana.

5. Isu strategis tentang eksistensi masyarakat berkarakter dan agamais.

Pembangunan masyarakat berkarakter berkaitan erat dengan penerapan tradisi dan budaya serta kearifan lokal di Kota Bima. Falsafah hidup masyarakat Bima yang sampai saat ini bahkan telah menjad motto pemerintah Kota Bima yaitu *Maja Labo Dahu*. Falsafah hidup ini selalu menjadi nasehat atau amanat orang-orang tua terhadap anak-naknya yang pergi merantau ke luar daerah. *Maja Labo Dahu* diartikan sebagai *Malu* dan *Takut* (*Maja* = Malu; *Dahu* = Takut). Merujuk pada kitab BO kesultanan Bima, *maja labo dahu* berarti malu untuk berbuat hal-hal yang diluar batas norma susila dan takut untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama.

6. Isu strategis yang terkait dengan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, meliputi: indeks pemberdayaan gender relatif masih rendah, pencegahan dan penuntasan kasus Kekerasan kepada perempuan dan anak.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

1. Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka pembangunan strategis Kota Bima untuk periode 5 (lima) Tahun. Sebagai dokumen yang memuat penjabaran visi, misi dan program Pemerintah Kota Bima. RPJMD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memerhatikan RPJP dan RPJM Nasional. Untuk periode 2018-2023 RPJMD Kota Bima disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023. Pemerintah Kota Bima telah menetapkan visi Pembangunan Kota Bima Tahun 2018-2023 yaitu **"Mewujudkan Kota Bima yang Berkualitas dan Setara menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri"**.

Adapun penjelasan mengenai substansi Visi tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1 Perumusan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
"Mewujudkan Kota Bima yang Berkualitas dan Setara menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri"	Kota Bima yang Berkualitas	Terbentuknya suatu komunitas yang mampu berfikir secara komperhensif dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan. Masyarakat yang berkualitas dapat dilihat dari beberapa aspek penting, yakni aspek fisik/jasmani, aspek psikis dan intelektual serta aspek kultural.
	Masyarakat Sejahtera	Suatu kondisi dimana taraf hidup masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan dari keadaan sebelumnya. Dalam perseptif ekonomi kondisi ini dapat dicapai dengan mengupayakan peningkatan ekonomi produktif dan pemerataan pembangunan serta Keadilan sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal
	Transparan	keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah
	Akuntabilitas	proses pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic
	Lingkungan Perkotaan yang Ramah	lingkungan Kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah
	Masyarakat Agamais	masyarakat yang bertaqwa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama

Sumber : RPJMD Kota Bima 2019-2023.

Untuk mewujudkan tercapainya visi tersebut, maka dijabarkan dalam 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kota Bima sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan masyarakat berkualitas yang berdaya saing;
- 2) Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis pengembangan produk unggulan;
- 3) Menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- 4) Mewujudkan lingkungan yang berkualitas dan ramah, melalui penyediaan infrastruktur pendukung perkotaan yang terintegrasi dengan pengurangan Resiko bencana;
- 5) Mewujudkan masyarakat yang berkarakter dan agamais.

Adapun penjelasan substansi misi tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2. 2 Perumusan Penjelasan Misi

Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1	2	3
Kota Bima yang Berkualitas	Misi Pertama : <i>Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing</i>	Mewujudkan suatu kondisi masyarakat baik secara kolektif maupun individual memiliki wawasan yang luas, cara berfikir komperhensif dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan.
Masyarakat Sejahtera	Misi Kedua : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	- Adanya peningkatan kondisi kesejahteraan masyarakat secara signifikan yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi daerah yang meningkat disertai dengan pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah. selain itu juga dengan memberikan keberpihakan/affirmatif dalam peningkatan ekonomi khususnya kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan

Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1	2	3
	yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan	wilayah yang masih tertinggal. - Peningkatan ekonomi masyarakat akan berbasis pada potensi produk unggulan yang ada di Kota Bima baik di sektor pertanian maupun non pertanian, yang pada pengembangannya dapat memberikan lapangan kerja baru dan nilai tambah ekonomi;
Transparan	<i>Misi Ketiga :</i> Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.	Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui pelaksanaan tahapan-tahapan reformasi birokrasi sehingga akan meningkatkan Efektifitas capaian hasil pembangunan, Efisiensi dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan, serta membuka ruang Partisipasi masyarakat dan swasta dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
Akuntabilitas		
Lingkungan Perkotaan yang Ramah	<i>Misi Keempat:</i> Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana	Terwujudnya lingkungan Kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah. Sehubungan dengan wilayah administrasi Kota Bima yang masih memiliki potensi terjadinya bencana terutama bencana banjir, maka Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan akan difokuskan terintegrasi dengan upaya pengurangan risiko bencana;
Masyarakat Agamais	<i>Misi Kelima :</i> Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan Agamais	Terwujudnya masyarakat yang memiliki keimanan dan ketqwaan yang baik, mematuhi aturan hukum negara dan agama, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama serta memiliki karakter individu dan komunitas yang bercirikan nilai agama melalui pemahaman dan pengamalan yang benar dan baik.

Sumber : RPJMD Kota Bima 2019-2023.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk

keberhasilan tersebut dirumuskan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bima 2018-2023 dan menetapkan sebanyak 6 (enam) tujuan dan 16 (enam belas) sasaran sebagaimana terlihat pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2. 3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bima

Tujuan	Sasaran
<i>Misi Pertama</i> : Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing;	
Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan
	Meningkatnya Daya Beli masyarakat
	Meningkatnya ketahanan pangan
<i>Misi Kedua</i> : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan	
Meningkatkan pemerataan Ekonomi masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
	Menurunnya angka kemiskinan
	Meningkatnya kesempatan kerja
<i>Misi Ketiga</i> : Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.	
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan
	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
<i>Misi Keempat</i> : Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana	
Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dan tata ruang	Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang
	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup
Meningkatkan kualitas infrastruktur dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman
	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah
<i>Misi Kelima</i> : Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan Agamais	
Meningkatkan masyarakat yang tentram, bermoral dan agamais	Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban
	Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal
	Meningkatnya pengamalan ajaran agama

2.2. Prioritas Daerah

Program pembangunan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023. Untuk itu di rumuskan Prioritas Pembangunan Kota Bima sebagai berikut:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
4. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5. Peningkatan Ekonomi Masyarakat
6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
7. Pemantapan Infrastruktur dan Perumahan Rakyat
8. Penanggulangan Bencana (PRB)
9. Budaya dan Kearifan Lokal berbasis nilai-nilai agama

2.3. Indikator Kinerja Utama Kota Bima

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

Pelaksanaan reviu terhadap sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Bima dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan terutama indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kota Bima telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Bima Nomor : 51 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Bima Tahun 2019-2023, sebagaimana tabel 2.4 berikut:

Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2019-2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi
1	2	3	4
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur
2.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	$\text{Indeks Pendidikan} = \frac{\text{IHLS} + \text{IRLS}}{2}$ <p>Keterangan : IHLS : Indeks Harapan Lama Sekolah IRLS : Indeks Rata-Rata Lama Sekolah</p>
3.	Meningkatnya Daya Beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	$\frac{\text{Total pengeluaran Rumah Tangga}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}}$
4.	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan harapan	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan

5.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB	$\frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk Pertengahan Tahun}} \times 100$
6.	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Tahun } n}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$
7.	Meningkatnya kesempatan kerja	Angka Pengangguran terbuka	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran Terbuka Usia Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100$
8.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Hasil Penilaian evaluasi akuntabilitas terhadap instansi Pemerintah Kota Bima oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		Skor LPPD	Hasil Penilaian dan evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bima
		Opini BPK	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah
9.	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio PAD terhadap APBD	$\frac{\text{Jumlah PAD Kota Bima}}{\text{Jumlah APBD}}$
10.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Rata-rata IKM} = \frac{\text{Kumulatif IKM unit Pelayanan}}{\text{Jumlah Unit Pelayanan}}$
11.	Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Indeks Kesesuaian Tata Ruang	Angka perhitungan dari hasil overlay peta land use pada Tahun berkenaan terhadap peta rencana pola ruang
12.	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	$\text{IKLH} = (\text{IPA} \times 30\%) + (\text{IPU} \times 30\%) + (\text{ITH} \times 40\%)$ <p>Dimana:</p> <p>IKLH= Indeks kualitas lingkungan hidup</p> <p>IPA = Indeks kualitas air</p> <p>IPU = Indeks Kualitas Udara</p> <p>ITH = Indeks tutupan hutan</p>
13.	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Luas kawasan kumuh	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas kawasan Perkotaan seluruhnya}} \times 100$

14.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik	$\frac{(\text{Infrastruktur dalam kondisi baik Tahun } n) - \text{infrastruktur dalam kondisi baik Tahun } n-1}{\text{Infrastruktur dalam kondisi baik Tahun } n-1} \times 100$
15.	Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	Indeks Ketangguhan Daerah	Angka kumulatif dari hasil pengukuran indeks prioritas dan indeks kapasitas daerah
16.	Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban	Persentase penurunan Angka kriminalitas	$\frac{(\text{Angka kriminalitas Tahun } n-1) - \text{Angka kriminalitas Tahun } n}{\text{Angka kriminalitas Tahun } n} \times 100$

2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bima Tahun 2019 mengacu pada dokumen RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020, dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2020. Pemerintah Kota Bima telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bima Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka	69,75
2.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	10,64
3.	Meningkatnya Daya Beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	Rp.000 / bulan	1.300,00
4.	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan harapan	Angka	85,70
5.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB	%	6,19
6.	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	8,60
7.	Meningkatnya kesempatan kerja	Angka Pengangguran terbuka	%	1
8.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Huruf dan Angka	BB (70,01)
		Skor LPPD	Angka	Sangat Tinggi (3,2000)
		Opini BPK	Huruf	WTP
9.	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio PAD terhadap APBD	%	7,19
10.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	B (80,00)
11.	Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Indeks Kesesuaian Tata Ruang	%	95
12.	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	50
13.	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Luas kawasan kumuh	%	2,64
14.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik	%	5
15.	Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	85
16.	Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban	Persentase penurunan Angka kriminalitas	%	15

2.5. Program dan Anggaran

Untuk mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Kota Bima Tahun 2020 telah menetapkan program dan anggaran, sebagaimana terlihat pada tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2. 6 Program dan Anggaran Tahun 2020

Sasaran		Anggaran
Sasaran 1: MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT		83.025.924.700
1.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	3.224.850.302
2.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.039.166.096
3.	Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular	150.226.000
4.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	27.717.132.697
5.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	15.397.479.588
6.	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan kesehatan	21.990.564.423
7.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1.403.888.515
8.	Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan KB	1.233.991.731
9.	Program Keluarga Berencana	805.561.400
10.	Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	382.955.000
11.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	87.448.000
12.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	477.241.875
13.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.280.904.014
	Program Bina Kesehatan Masyarakat	6.110.463.682
	Program Pelayanan Kesehatan Penunjang	230.097.077
	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	493.954.300
SASARAN 2 : MENINGKATNYA AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN		44.089.146.258
1.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	5.992.629.106
2.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	36.819.468.452
3.	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Pendidikan	288.724.500
4.	Program Pendidikan Non Formal	80.225.000
5.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	736.142.000
6.	Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	171.957.200

Sasaran		Anggaran
Sasaran 3 : Meningkatnya daya beli masyarakat		1.416.768.650
1.	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	175.495.300
2.	Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil menengah	371.780.100
3.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan	25.990.000
4.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	70.036.185
5.	Program peningkatan produksi perkebunan	269.743.300
6.	Program peningkatan produksi tanaman hortikultura	503.723.765
SASARAN 4 : MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN		1.506.629.926
1.	Program peningkatan ketahanan pangan	261.557.600
2.	Program peningkatan pemasaran hasil produk pertanian/perkebunan	470.007.025
3.	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	775.065.301
sasaran 5 : meningkatkannya pertumbuhan ekonomi		26.236.947.018
1.	program pengembangan budidaya perikanan	763.106.142
2.	program pengembangan perikanan tangkap	2.432.937.851
3.	program pengembangan pemasaran pariwisata	1.610.166.367
4.	program pengembangan industri dan kemitraan pariwisata	81.528.000
5.	program peningkatan produksi hasil peternakan	2.564.305.600
6.	program pengembangan sentra-sentra industri potensial	1.733.511.560
7.	program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	1.960.683.000
8.	program peningkatan realisasi dan kerjasama investasi	94.977.300
9.	program peningkatan iklim investasi dan realisasi investsi	107.237.700
10.	program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	14.888.493.498
11.	program pengembangan budidaya perikanan	763.106.142
sasaran 6 : menurunnya angka kemiskinan		9.287.352.232
1.	program pemberdayaan fakir miskin	1.576.309.000
2.	program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	498.566.000
3.	program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	498.566.000
4.	program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	194.960.000
5.	program perlindungan dan jaminan sosial	440.934.150
6.	program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	1.465.840.519
7.	program pengembangan perumahan	4.612.176.563
sasaran 7 : meningkatnya kesempatan kerja		677.513.525
1.	program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga	357.060.825

Sasaran		Anggaran
	kerja	
2.	program peningkatan kesempatan kerja	135.800.200
3.	program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	184.652.500
sasaran 8 : meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah		38.875.914.777
1.	program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota	805.434.875
2.	program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh	1.658.328.597
3.	program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya	244.117.872
4.	program penelitian dan pengembangan daerah	941.501.379
5.	program perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan sosial	751.398.606
6.	program perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan infrastruktur	2.602.879.347
7.	program pengendalian perencanaan daerah	1.230.363.688
8.	program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	5.509.704.912
9.	program peningkatan pengelolaan aset/barang milik daerah	1.195.674.871
10.	program peningkatan pengendalian tata kelola keuangan	1.270.428.966
11.	program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	916.349.314
12.	program peningkatan kompetensi aparaturnya	659.292.900
13.	program pembangunan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian kota bima	185.615.200
14.	program pembinaan dan pengembangan aparaturnya	1.071.997.095
15.	program pelayanan administrasi kepegawaian	371.682.800
16.	program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	316.025.192
17.	program pengadaan perangkat aplikasi dan telematika	9.133.769.873
18.	program keamanan informasi pemerintah daerah	273.940.618
19.	program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	5.705.782.028
20.	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4.031.626.644
sasaran 9 : meningkatnya kemandirian keuangan daerah		6.149.328.674
1.	program peningkatan pengelolaan pendapatan daerah	1.199.663.543
2.	program peningkatan layanan parkir	1.435.977.822
3.	program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	473.980.000
4.	program pengembangan destinasi pariwisata	3.039.707.309
sasaran 10 : meningkatnya kualitas pelayanan publik		18.248.125.396

Sasaran		Anggaran
1.	program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	15.397.479.588
2.	program penatan administrasi kependudukan	1.574.196.538
3.	program peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informatika	876.461.770
4.	program peningkatan kualitas pelayanan informasi, pengaduan dan pengembangan pelayanan	199.627.500
5.	program peningkatan kualitas pelayanan dan perizinan	200.360.000
sasaran 11 : meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang		5.494.505.518
1.	program perencanaan tata ruang	625.255.860
2.	program pemanfaatan ruang	198.587.248
3.	program pengendalian pemanfaatan tata ruang	265.100.000
4.	program pengembangan kawasan	21.577.000
5.	program penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan	4.383.985.410
sasaran 12 : meningkatnya kualitas lingkungan hidup		11.979.804.875
1.	program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	183.330.271
2.	program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	547.913.500
3.	program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	109.035.000
4.	program peningkatan pengendalian polusi	53.285.000
5.	program pengelolaan areal pemakaman	2.106.016.000
6.	program peningkatan sarana dan prasarana pertamanan	2.068.433.300
7.	program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan lainnya	914.963.000
8.	program pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong	5.996.828.804
sasaran 13 : meningkatnya kualitas kawasan permukiman		39.220.683.963
1.	program pengembangan lingkungan sehat	142.830.250
2.	program pembangunan turap/talud/brongjong	4.017.970.000
3.	program pengembangan kinerja pengembangan air minum dan air limbah	12.417.042.363
4.	program pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	18.887.512.400
5.	program perencanaan pemukiman kumuh	267.590.000
6.	program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	3.487.738.950
sasaran 14 : meningkatnya kualitas infrastruktur daerah		38.129.685.462
1.	program pembangunan turap/talud/brongjong	4.017.970.000
2.	program kesiapsiagaan dan peringatan dini	232.610.627
3.	program peningkatan pelayanan kedaruratan dan logistik	502.916.400

Sasaran		Anggaran
4	program rehabilitas dan rekonstruksi	31.660.263.735
5.	program mitigasi dan pencegahan	590.892.100
6	program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1.125.032.600
sasaran 15 : meningkatnya ketahanan terhadap bencana		38.129.685.462
1.	program pembangunan turap/talud/brongjong	4.017.970.000
2.	program kesiapsiagaan dan peringatan dini	232.610.627
3.	program peningkatan pelayanan kedaruratan dan logistik	502.916.400
4.	program rehabilitas dan rekonstruksi	31.660.263.735
5.	program mitigasi dan pencegahan	590.892.100
6.	program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1.125.032.600
Sasaran 16 : meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban		7.064.676.610
1.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.234.557.600
2.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	362.366.000
3.	Program penegakan perda	2.332.447.010
4.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	358.428.000
	program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	2.776.878.000
Jumlah		356.540.634.693



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Kota Bima selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban melaksanakan penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bima yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, IKU Tahun 2018-2013, RKPD Tahun 2020, dan PK Tahun 2020.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran Pemerintah Kota Bima. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Bima tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Skala nilai peringkat kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagaimana tabel 3.1 berikut :

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria
1.	91% ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2.	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3.	66 % ≤ 75 %	Sedang
4.	51 % ≤ 65 %	Rendah
	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber Permendagri 54 Tahun 2010

3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Pada Tahun 2020 Pemerintah Kota Bima telah berusaha mewujudkan misi dan tujuannya melalui 16 sasaran dan 18 indikator kinerja dalam IKU maupun perjanjian kinerja Tahun 2020. Kemudian telah dilakukan pengukuran kinerja sasaran sebagaimana tersaji pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3. 2 Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemerintah Kota Bima Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	8	9	10
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka	69,75	70,38	100,90
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	10,64	12,75	119,78
3	Meningkatnya Daya Beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	Rp.000 / bulan	1.300	1.366,74	105,13
4	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan harapan	Angka	85,7	85,7	100,00
5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB	%	6,19	-4,95	-79,97
6	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	8,6	8,35	102,99
7	Meningkatnya kesempatan kerja	Angka Pengangguran terbuka	%	1	4,42	22,62
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Huruf dan Angka	BB (70,01)	Belum rilis	
		Skor LPPD	Angka	Sangat Tinggi (3,2000)	Belum rilis	
		Opini BPK	Huruf	WTP	WTP	100
9	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio PAD terhadap APBD	%	7%	6,41%	89,20
10	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	B (80,00)	82,61	103,26
11	Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Indeks Kesesuaian Tata Ruang	%	95	98,1	103,26
12	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	50	74,12	148,25
13	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Luas kawasan kumuh	%	2,64	13,37	19,75
14	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik	%	5%	2,8%	56,25

15	Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	85	74	87,06
16	Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban	Persentase penurunan Angka kriminalitas	%	15	-104,1	-14,41
Rata-rata						72,24

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Bima pada Tahun 2020 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Rekapitulasi Pencapaian Sasaran

No	Predikat Sasaran	Jumlah Sasaran	%
1.	Sangat Tinggi	9	56,25
2.	Tinggi	2	12,5
3.	Sedang	0	0
4.	Rendah	1	6,25
5.	Sangat Rendah	4	25
	Jumlah	16	100

Berdasarkan hasil analisis tersebut bahwa pada Tahun 2020 jumlah sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 16 sasaran, dengan rata-rata capaian kinerja 72,24 % dengan predikat Sedang.

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan 2020

Tabel 3. 4 Perbandingan Kinerja Tahun 2019 dengan 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Capaian Kinerja 2019	Realisasi 2020	Capaian Kinerja 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,2	101	70,30	100,79
2	Meningkatnya aksesibilitas dan	Indeks Pendidikan	12,69	122	12,75	119,78

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Capaian Kinerja 2019	Realisasi 2020	Capaian Kinerja 2020
1	2	3	4	5	6	7
	kualitas pendidikan					
3	Meningkatnya Daya Beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	1,399,041	117	1.366,747	105,13
4	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan harapan	85,5	103	85,7	100,00
5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB	5,22	90	-4,95	-79,97
6	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	8,6	103	8,35	102,99
7	Meningkatnya kesempatan kerja	Angka Pengangguran terbuka	4,18	1	4,42	22,62
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	67,05	102	belum rilis	
		Skor LPPD	Sangat Baik 3,2595	102	belum rilis	
		Opini BPK	WTP	100	WTP	100
9	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio PAD terhadap APBD	5,58	93	6,41%	89,20
10	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat	82,36	105	82,61	103,26
11	Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Indeks Kesesuaian Tata Ruang	98,1	103	98,1	103,26
12	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	83,84	105	74,123	148,25
13	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Luas kawasan kumuh	6,23	148	13,37	19,75
14	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik	4,21	84	2,8%	56,25
15	Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	84	105	74	87,06
16	Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban	Persentase penurunan Angka kriminalitas	67	223	-104,1%	-14,41

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Capaian Kinerja 2019	Realisasi 2020	Capaian Kinerja 2020
1	2	3	4	5	6	7
Rata-rata				112		72,24

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan Target RPJMD 2018-2023

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target RPJMD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka	69,55	69,75				70,2	70,30			
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	10,39	10,64				12,69	12,75			
3	Meningkatnya Daya Beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	Rp. 000 / bulan	1.200	1.300,00				1.399,041	1366,75			
4	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan harapan	Angka	83,3	85,7				85,5	85,70			
5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB	%	5,8	5,85				5,22	-4,95			
6	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	8,9	8,6				8,6	8,35			
7	Meningkatnya kesempatan kerja	Angka Pengangguran terbuka	%	3,75	3,7				4,18	4,42			
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan	Nilai SAKIP	Huruf dan Angka	65,58	BB (70,01)				67,05	Belum rilis			

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
	dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Skor LPPD	Angka	Sangat Tinggi (3,1930)	Sangat Tinggi (3,1950)				Sangat Baik 3,2595	belum rilis			
		Opini BPK	Huruf	WTP	WTP				WTP	WTP			
9	Meningkatkan kemandirian keuangan daerah	Rasio PAD terhadap APBD	%	6	6,5				5,58	6,41			
10	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	78,58	B (80,00)				82,36	82,61			
11	Meningkatkan ketaatan terhadap rencana tata ruang	Indeks Kesesuaian Tata Ruang	%	95	95				98,1	98,10			
12	Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	80	75				83,84	74,12			
13	Meningkatkan kawasan permukiman	Luas kawasan kumuh	%	9,22	7,22				6,23	0,75			
14	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik	%	5	5				4,21	2,80			
15	Meningkatkan Ketahanan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	80	85				84	74,00			
16	Meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban	Persentase penurunan Angka kriminalitas	%	30	15				67	-104,10			

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan Capaian/Standar Provinsi NTB dan Nasional

Tabel 3. 6 Perbandingan realisasi Kinerja dengan Standar/Capaian Provinsi NTB dan Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Kota Bima	Capaian Provinsi NTB	Standar/Capaian Nasional
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka	70,30	66,51	71,47
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	12,75	10,51	10,73
3	Meningkatnya Daya Beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	Rp.000 / bulan	1.366,747	933 ,358	882,829
4	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan harapan	Angka	85,7	85,30	90,80
5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB	%	-4,95	-0,64	-2,07
6	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	8,35	13,97	9,78
7	Meningkatnya kesempatan kerja	Angka Pengangguran terbuka	%	4,42	4,22	7,07
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Huruf dan Angka	Belum rilis	-	67,00
		Skor LPPD	Angka	belum rilis	-	-
		Opini BPK	Huruf	WTP	WTP	-
9	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio PAD terhadap APBD	%	5,70	-	-
10	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82,61	-	-
11	Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Indeks Kesesuaian Tata Ruang	%	98,1	-	-
12	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	74,123	-	68,71
13	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Luas kawasan kumuh	%	0,75	-	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Kota Bima	Capaian Provinsi NTB	Standar/Capaian Nasional
1	2	3	4	5	6	7
14	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik	%	2,8%	-	-
15	Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	74	-	-
16	Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban	Persentase penurunan Angka kriminalitas	%	-104,1%	-	-

3.1.5. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

3.1.5.1. Sasaran 1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Untuk mengukur sasaran 1 : meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Bima Tahun 2020 sebesar 70,38 Tahun, mengalami peningkatan sebesar 0,18 Tahun dibanding Tahun 2019. Atas perolehan nilai tersebut, Pemerintah Kota Bima telah berhasil mencapai target kinerja sebesar 100,90% dari target RPJMD.

AHH adalah angka perkiraan lama hidup penduduk yang lahir pada suatu daerah. Oleh karena itu AHH Kota Bima sebesar 70,38 memiliki arti bahwa setiap bayi yang lahir di Kota Bima pada Tahun 2020 mempunyai harapan hidup

hingga berusia 70 Tahun 4 bulan dan 17 hari. Adapun analisis pencapaian sasaran 1 dapat dilihat tabel 3.7 berikut.

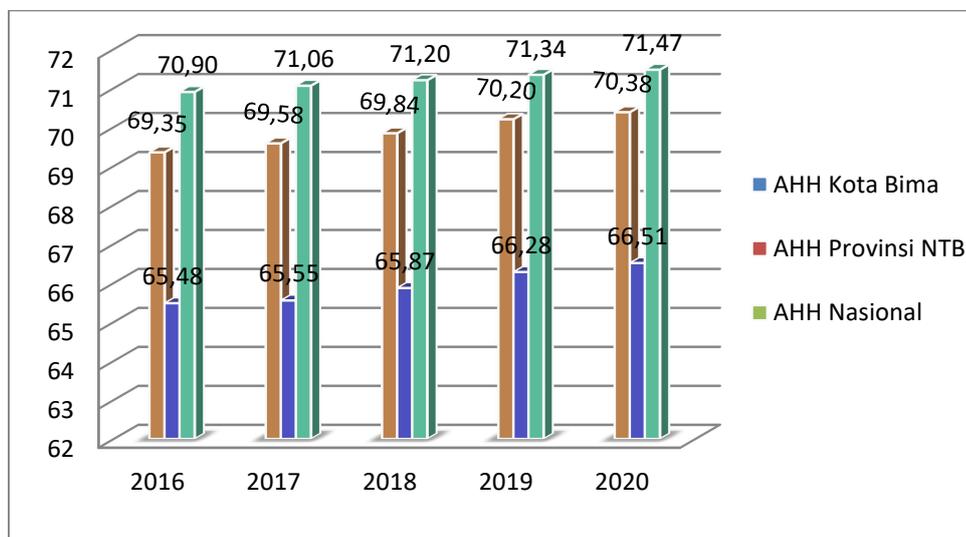
Tabel 3. 7 Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 1

Sasaran Strategis 1	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	69,75	70,38	100,90

Kecenderungan setiap tahun bahwa AHH Kota Bima selalu mengalami peningkatan dan unggul diatas AHH NTB. Pada Tahun 2020 AHH Kota Bima unggul diatas AHH Provinsi NTB sebesar 3,87 tahun sehingga anak yang lahir di Kota Bima pada Tahun 2019 mempunyai harapan hidup tambahan 3 Tahun 10 bulan dan 13 hari dibanding penduduk yang ada di Provinsi NTB secara umum, perbandingan AHH Kota Bima dengan NTB dapat dilihat pada grafik 3.1.

Grafik 3.1 diatas memperlihatkan tren peningkatan AHH Kota Bima dari Tahun 2013 hingga 2020 setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Tingginya kesadaran masyarakat Kota Bima yang didukung oleh semakin membaiknya kemampuan ekonomi masyarakat serta didukung juga oleh peningkatan kualitas sarana kesehatan oleh Pemerintah dan masyarakat.

Kota Bima merupakan daerah yang memiliki AHH tertinggi kedua setelah Kota Mataram untuk seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Kemudian jika dibanding dengan AHH nasional bahwa AHH Kota Bima masih berada dibawah AHH nasional yang telah mencapai 71,20 atau selisih 0,39 poin. Secara rinci perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Bima dengan Provinsi dan Nasional



Grafik 3. 1 Perbandingan AHH Kota Bima , AHH Provinsi NTB dan AHH Nasional Tahun 2016-2020

Faktor pendukung pencapaian kinerja, meliputi meningkatnya komitmen Pemerintah Kota Bima dalam mendorong program peningkatan pelayanan pada urusan kesehatan, baik peningkatan sarana dan prasarana, SDM, dan anggaran, sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** berupa masih rendahnya kualitas sarana dan

prasarana kesehatan dan terbatasnya tenaga kesehatan (khususnya dokter spesialis). **Solusi** untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kedepannya melalui pengusulan formasi bagi dokter spesialis dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang ada pada RSUD maupun Puskesmas.

3.1.5.2. Sasaran 2 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan.

Untuk mengukur sasaran 2 : meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan, diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu Indeks Pendidikan. Indeks Pendidikan Kota Bima pada Tahun 2020 sebesar 12,75 atau peningkatan 0,06 poin dibanding Tahun 2019. Atas perolehan tersebut, Pemerintah Kota Bima telah mampu mencapai kinerja sebesar 119,78 % dari target sebesar 10,64 pada RPJMD. Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran 2 dapat dilihat tabel 3.8 berikut.

Tabel 3. 8 Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 2

Sasaran 2	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan.	Indeks Pendidikan	10,64	12,75	119,79

Selanjutnya analisis perbandingan dengan Kabupaten/Kota se NTB, Kota Bima berada pada peringkat tertinggi. Selain itu indeks pendidikan Kota Bima telah

melampaui Indeks Pendidikan Provinsi NTB maupun Nasional. Untuk rincian perbandingan tersebut dapat dilihat pada grafik 3.3. Untuk kurun waktu selama 6 (enam) Tahun pada periode 2015-2020 bahwa rata-rata indeks pendidikan di Kota Bima sebesar 12,58. Indeks pendidikan 2020 merupakan indeks pendidikan yang tertinggi untuk seluruh kabupaten/kota di NTB, untuk lebih jelasnya dapat melihat grafik 3.2 dan 3.3 berikut.



Grafik 3. 2 Perbandingan Indeks Pendidikan Kota Bima dengan Provinsi NTB dan Nasional



Grafik 3. 3 Perbandingan Indeks Pendidikan Kota Bima selama Tahun 2015-2020

Faktor pendukung pencapaian kinerja, meliputi meningkatnya komitmen kepala daerah dalam membangun pendidikan di daerah, baik sarana prasarana, SDM, anggaran, sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** berupa masih lemah kualitas SDM pendidikan dan sarana prasarana. **Solusi** untuk meningkatkan indeks pendidikan untuk kedepannya, perlu meningkatkan SDM dan Sarana Prasarana Pendidikan.

3.1.5.3. Sasaran 3 : Pengeluaran Perkapita

Untuk mengukur sasaran 3 : meningkatnya daya beli masyarakat, diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu Pengeluaran Perkapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung sebulan dan setahun terakhir. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan.

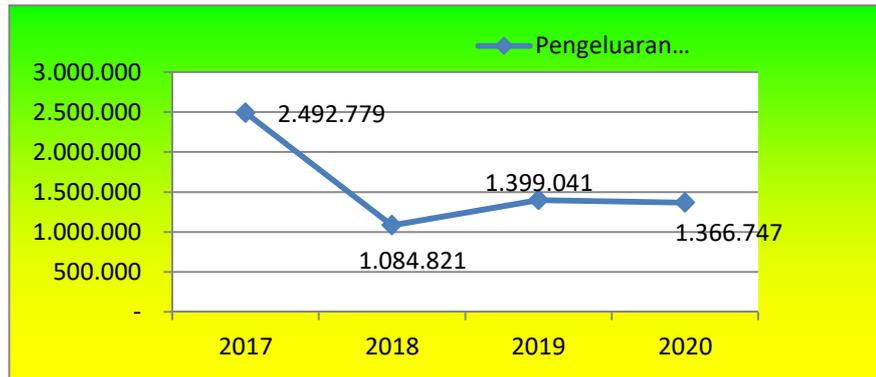
Angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengonsumsi makanan

maupun tidak) terhadap jumlah penduduk. Pengeluaran perkapita penduduk Kota Bima pada Tahun 2020 sebesar Rp.1.399.041/bulan. Atas perolehan tersebut, maka Pemerintah Kota Bima telah mampu mencapai kinerja sebesar 105,13 % dari target sebesar Rp. 1.300.000,-/bulan pada RPJMD. Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran 3 dapat dilihat tabel 3.9 berikut.

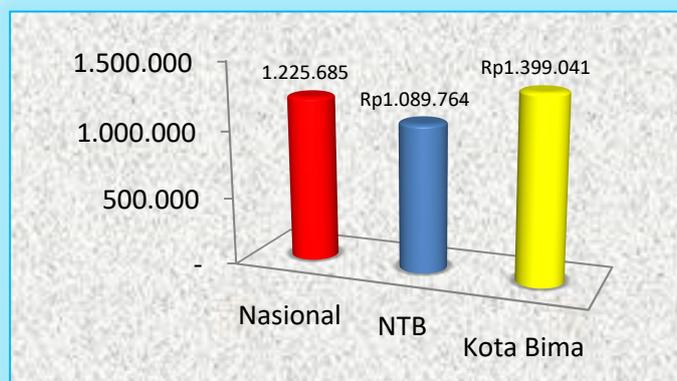
Tabel 3. 9 Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 3

Sasaran 3	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya Daya Beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	Rp1.300.00	Rp.1.399.041	105,13

Pada Tahun 2020, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Kota Bima diperoleh dari pengeluaran makanan sebesar Rp. 688,034 dan pengeluaran non makanan sebesar Rp. 678,713 Atas kondisi tersebut, maka pengeluaran penduduk di Kota Bima Tahun 2020 masih didominasi oleh konsumsi makanan sebesar 51,37 %. Jika dibanding Tahun 2019 pengeluaran perkapita penduduk Kota Bima meningkat, sebagaimana terlihat grafik 3.4 dan 3.5 berikut.



Grafik 3. 4 Perbandingan Pengeluaran Perkapita/bulan Penduduk Kota Bima Tahun 2017- 2020



Grafik 3. 5 Perbandingan Pengeluaran Perkapita/bulan Penduduk Kota Bima dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2020

Berdasarkan grafik diatas bahwa pengeluaran perkapita/bulan penduduk Kota Bima sudah berada diatas rata-rata Provinsi dan rata-rata nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, maka kemampuan ekonomi penduduk Kota Bima jauh lebih baik dari penduduk NTB dan Indonesia secara umum.

Faktor pendukung pencapaian kinerja, meliputi meningkatnya kemajuan Kota Bima, terutama sektor perbankan, UMKM, dan jasa. sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** berupa masih belum optimalnya

pengembangan produk unggulan daerah, terutama peningkatan kualitas dan promosi hasil olahan lokal sehingga produk unggulan daerah menjadi kalah bersaing dengan produk daerah lain. **Solusi** untuk meningkatkan nilai produk unggulan daerah adalah melalui peningkatan kualitas produk dan pemasaran yang lebih luas dengan menggunakan teknologi informasi.

3.1.5.4. Sasaran 4 : Meningkatnya Ketahanan Pangan

Untuk mengukur sasaran 4 : meningkatnya ketahanan pangan, diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu skor Pola Pangan Harapan (PPH). Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, diperlukan target pencapaian angka ketersediaan pangan perkapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI Tahun 2014 merekomendasikan kriteria ketersediaan pangan ditetapkan minimal 2.400 kkal/kapita/hari untuk energi dan minimal 63 gram/kapita/hari untuk protein.

Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari 3 sumber, yaitu: 1) produksi dalam negeri; 2) pemasokan pangan; 3) pengelolaan cadangan pangan. Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai tingkatan mencakup rumah tangga. Penyediaan pangan yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk, baik jumlah maupun mutunya merupakan harapan setiap upaya pemenuhan kebutuhan pangan.

Skor PPH berdasarkan proporsi sumbangan energi. Kelompok bahan makanan PPH meliputi: padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah dan biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta lain-lain. Jenis pangan dikelompokkan menjadi sembilan yaitu: padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, serta lain-lain. Penilaian Skor PPH dikategorikan menjadi empat, yaitu: sangat rendah (<55%), rendah (55-69%), cukup (70-84%) dan baik (\geq 85%). Susunan Skor Pola Pangan Harapan Kota Bima Tahun 2020 disajikan pada tabel 3.10 berikut.

Tabel 3. 10 Skor Pola Pangan Harapan Tahun Konsumsi Pangan Penduduk Kota Bima Tahun 2020

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/ Kapita/ Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/ Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Padi-padian	421,0	1.673	70,7	77,8	0,5	35,3	38,9	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	13,0	14	0,6	0,7	0,5	0,3	0,3	2,5	0,3
3	Pangan Hewani	137,7	242	10,2	11,2	2,0	20,4	22,5	24,0	22,5
4	Minyak dan Lemak	18,6	167	7,1	7,8	0,5	3,5	3,9	5,0	3,9
5	Buah/ Biji Berminyak	2,7	14	0,6	0,7	0,5	0,3	0,3	1,0	0,3
6	Kacang-kacangan	12,6	31	1,3	1,4	2,0	2,6	2,9	10,0	2,9
7	Gula	12,4	47	2,0	2,2	0,5	1,0	1,1	2,5	1,1
8	Sayur dan Buah	303,4	128	5,4	6,0	5,0	27,0	29,8	30,0	29,8
9	Lain-lain	154,8	51	2,2	2,4	-	-	-	-	-
	Total		2.367	100,0	110,1		90,5	99,7	100,0	85,7

Sumber : Dinas ketahanan Pangan Kota Bima

Skor Pola Pangan Harapan Kota Bima pada Tahun 2020 sebesar 85,7. Atas perolehan tersebut, maka Pemerintah Kota Bima telah mampu mencapai kinerja sebesar 100 % dari target sebesar 85,70 pada RPJMD. Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran 4 dapat dilihat tabel 3.11 berikut.

Tabel 3. 11 Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 4

Sasaran 4	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya ketahanan pangan	Skor pola pangan harapan	85,7	85,7	100,00

Bahwa capaian PPH Kota Bima masih dibawah target nasional 93,3 %, namun masih termasuk dalam kategori baik. Hal ini disebabkan karena masih tingginya tingkat konsumsi

beras masyarakat yang memberikan kontribusi terbesar untuk rendahnya PPH Kota Bima yang digambarkan dari ketersediaan energi. Dimana energi yang disumbangkan dari pangan jenis padi padian sebesar 1.637 kkal dari jumlah kebutuhan energi Kota Bima sudah mencapai 2.367 kkal. Jika dilihat dari Skor PPH atau tingkat keragaman ketersediaan pangan yang ada di Kota Bima pada tabel 3.10 diatas bahwa kelompok pangan yang masih dibawah standar minimal meliputi pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayuran dan buah. Keragaman sayur dan buah relatif kurang, selain pada sisi produksi dan harga yang relatif tinggi. Skor Pola Pangan Harapan untuk ketersediaan energi di Tahun 2020 terealisasi 2.572 kkal/kapita/hari, artinya sudah memenuhi standar minimal 2.400 kkal/kapita/hari menurut Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI Tahun 2014. Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Kota Bima Tahun 2017-2020 sebagaimana terlihat pada grafik 3.7 berikut.



Berdasarkan analisis angka PPH Kota Bima selama 3 tahun terakhir bahwa capaian tertinggi pada Tahun 2018, kemudian pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 9,8 poin sedangkan Tahun 2020 mengalami kenaikan 0,2 poin. Pada Tahun 2018 ketersediaan pangan untuk 9 (Sembilan) bahan pangan sangat cukup atau baik, hal ini dikarenakan tingkat keragaman ketersediaan pangan dan tingkat distribusi serta penyebaran pangan tersebut cukup merata dilihat dari angka kecukupan energi 1.77%.

Faktor pendukung pencapaian kinerja adalah ketersediaan pangan dan tingkat distribusinya cukup merata. sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** berupa masih kurang tingkat keragaman ketersediaan pangan. **Solusi** untuk meningkatkan skor PPH diperlukan intervensi program edukasi dan promosi diversifikasi pangan, pemanfaatan pekarangan melalui Kelompok Rumah Pangan Lestari (KRPL).

3.1.5.5. Sasaran 5 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

Untuk mengukur sasaran 5 : meningkatnya pertumbuhan ekonomi, diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari

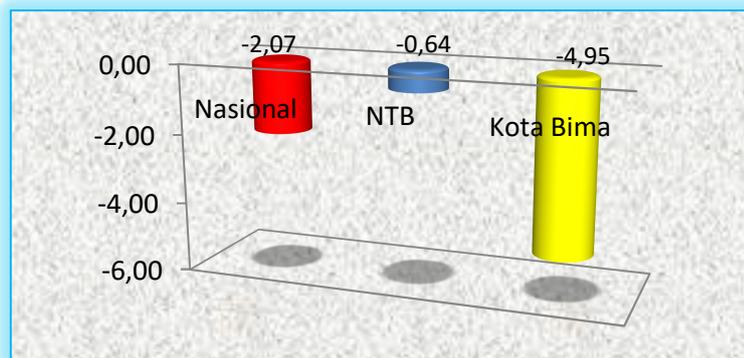
perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDRB pada Tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Pertumbuhan PDRB Kota Bima pada Tahun 2020 sebesar -4,95. Atas perolehan tersebut, maka Pemerintah Kota Bima hanya mampu mencapai kinerja sebesar -79,97% dari target sebesar 6,19 pada RPJMD. Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran 5 dapat dilihat tabel 3.12 berikut.

Tabel 3. 12 Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 5

Sasaran 5	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB	6,19	-4,95	-79,97

Jika dibanding Tahun 2019 pertumbuhan PDRB Kota Bima menurun drastis sebesar 10,17%. Selanjutnya pertumbuhan PDRB Kota Bima berada dibawah rata-rata Provinsi NTB dan nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pertumbuhan PDRB Kota Bima jauh lebih rendah dari Provinsi NTB dan Nasional, sebagaimana tersaji pada grafik 3.7 berikut.

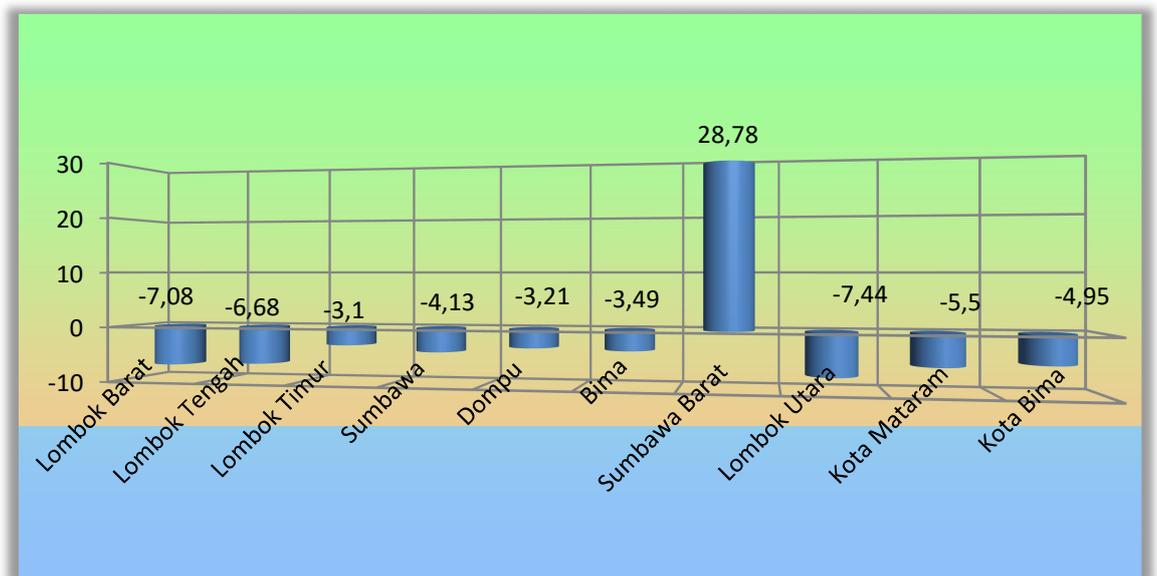


Grafik 3. 7 Perbandingan Pertumbuhan PDRB Kota Bima Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2020

Tabel 3. 13 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto pada Harga Pasar Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha taun 2018-2020

NO.	LAPANGAN USAHA PDRB	LAJU PERTUMBUHAN PDRB (PERSEN)		
		2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,08	3,62	-0,53
2	Pertambangan dan Penggalian	5,65	4,72	-6,59
3	Industri Pengolahan	3,97	4,52	-0,73
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,93	7,46	-
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,87	3,43	-2,23
6	Konstruksi	4,93	4,24	-13,90
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,99	7,13	-6,01
8	Transportasi dan Pergudangan	4,29	6,18	-19,22
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,86	4,61	-5,24
10	Informasi dan Komunikasi	6,62	5,93	13,48
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,29	1,97	1,95
12	Real Estat	5,74	5,89	1,29
13	Jasa Perusahaan	7,40	4,18	-1,94
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	0,98	1,07	-0,38
15	Jasa Pendidikan	5,53	7,56	1,35
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,94	5,25	0,83
17	Jasa Lainnya	5,71	6,35	-5,97
Produk Domestik Regional Bruto		4,74	5,22	-4,95

Dari Tabel 3.13 diatas dapat terlihat bahwa hampir semua lapangan usaha PDRB mengalami penurunan pertumbuhan, terutama lapangan usaha bidang transportasi dan pergudangan serta bidang konstruksi. Hal ini juga hampir terjadi pada semua kabupaten/ Kota di Provinsi NTB kecuali Kabupaten Sumbawa Barat.



Grafik 3. 8 Laju pertumbuhan PDRB 2020 Kabupaten Kota Di NTB Tahun 2020

Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja, dengan adanya Pandemi Covid-19 dapat menghambat kemajuan Kota Bima, terutama sektor UMKM, dan jasa karena kota bima masih mengadakan diri sebagai kota Jasa. Faktor lainnya adalah masih belum optimalnya pengembangan produk unggulan daerah, terutama peningkatan kualitas dan promosi hasil olahan lokal sehingga produk unggulan daerah menjadi kalah

bersaing dengan produk daerah lain. **Solusi** untuk meningkatkan nilai produk unggulan daerah melalui pembinaan pelaku usaha, peningkatan kualitas produk dan pemasaran yang lebih luas dengan menggunakan teknologi informasi.

3.1.5.6. Sasaran 6 : Menurunnya angka kemiskinan

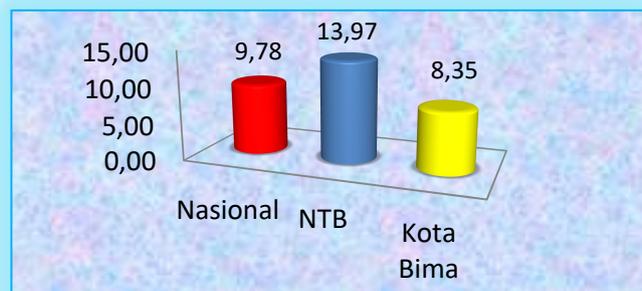
Untuk mengukur sasaran 6 : menurunnya angka kemiskinan, diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu angka kemiskinan. Berdasarkan data BPS yang dirilis September 2020 bahwa persentase penduduk miskin di Kota Bima sebesar 8,35 % sehingga terjadi penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,25 dibanding Tahun 2019. Atas perolehan tersebut, maka Pemerintah Kota Bima telah mampu mencapai target kinerja RPJMD sebesar 102,99 % dari target sebesar 8,60, analisis pencapaian indikator kinerja sasaran 6 dapat dilihat tabel 3.14 berikut.

Tabel 3. 14 Analisis Pencapaian Sasaran 6

Sasaran 6	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
		Target	Realisasi	
Menurunnya angka	Persentase Penduduk	8,60	8,35	102,99%

kemiskinan	Miskin			
------------	--------	--	--	--

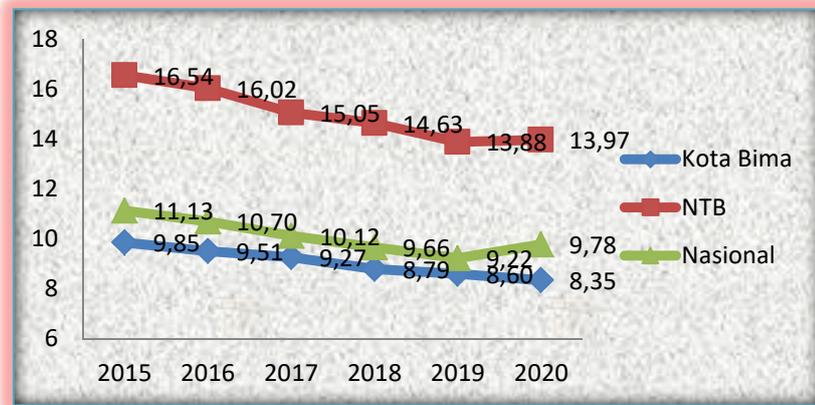
Saat ini persentase penduduk miskin Kota Bima merupakan yang terendah diantara kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat dan jika dibanding Provinsi NTB maka Pemerintah Kota Bima lebih baik dalam menekan persentase penduduk miskin yang masih sebesar 13,97 % dari Provinsi NTB. Kemudian jika dibanding dengan nasional, maka Pemerintah Kota Bima lebih mampu mengurangi persentase penduduk miskin sebesar 0,62 %, sebagaimana tersaji pada grafik 3.9 berikut.



Grafik 3. 9 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Bima dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2020

Selanjutnya apabila dilakukan perbandingan persentase penduduk miskin beberapa tahun sebelumnya, maka persentase penduduk miskin pada Tahun 2020 merupakan

yang terendah sepanjang dibentuknya Pemerintah Kota Bima, data perbandingan tersebut terlihat pada grafik 3.10 berikut ini.



Grafik 3. 10 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin di Kota Bima dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2015 – 2020

Faktor pendukung pencapaian kinerja, meliputi meningkatnya komitmen kepala daerah untuk melaksanakan program penanganan kemiskinan yang terintegrasi, baik perencanaan dan pelaksanaannya, sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** berupa masih lemah aspek koordinasi dalam pendataan dan verifikasi data kemiskinan di daerah sehingga menghambat pelayanan. **Solusi** untuk meningkatkan kualitas data yang valid diperlukan penyamaan persepsi antara Pemerintah Kota Bima dengan seluruh pihak yang terlibat (*stakeholders*) dalam penanggulangan kemiskinan di daerah.

3.1.5.7. Sasaran 7 : Tingkat Pengangguran Terbuka

Untuk mengukur sasaran 7 : meningkatnya kesempatan kerja, diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT menggambarkan perbandingan jumlah penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha dan penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja terhadap angkatan kerja.

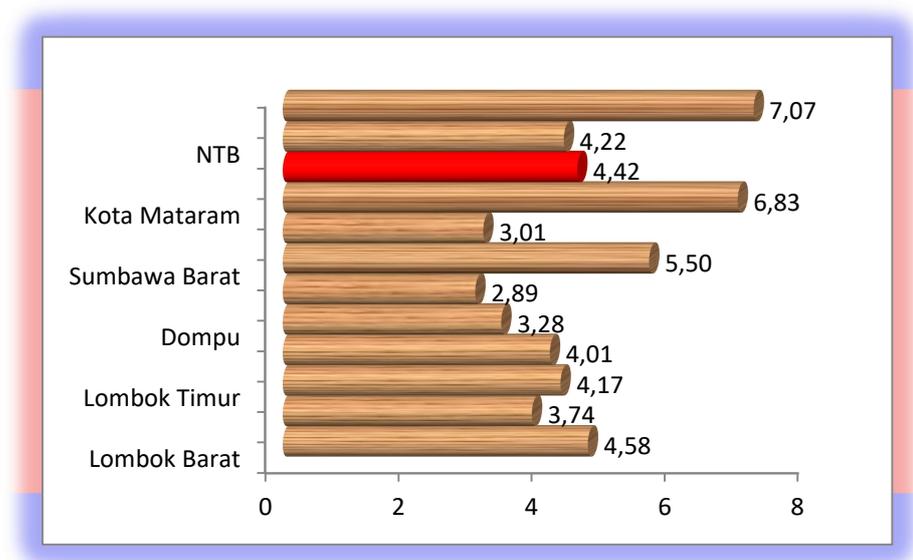
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bima Tahun 2020 sebesar 4,42 % atau naik sebesar 0,24% dibanding Tahun 2019. Atas perolehan tersebut, maka Pemerintah Kota Bima berhasil mencapai target kinerja sebesar 22,62 % dari target RPJMD sebesar 1 %. Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran 7 dapat dilihat tabel 3.15 berikut.

Tabel 3. 15 Pencapaian Indikator Sasaran 7

Sasaran 7	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	1	4,42	22,62

Dengan melaksanakan analisa perbandingan dengan beberapa Kabupaten/Kota lainnya di NTB dapat dilihat pada grafik 3.11 diatas. Pada Tahun 2019 bahwa Tingkat

Pengangguran Terbuka Kota Bima merupakan yang tertinggi ketiga dari seluruh Kabupaten/Kota di NTB, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bima lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi NTB, namun masih berada dibawah rata-rata nasional dengan angka TPK sebesar 7,07 %, sebagaimana terlihat pada grafik 3.11 berikut.



Grafik 3. 11 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota,Provinsi dan Nasional Tahun 2020

Faktor pendukung pencapaian kinerja, meliputi meningkatnya komitmen Pemerintah Kota Bima dalam mendorong program perluasan lapangan kerja, membangun kelembagaan dan sarana prasarana ketenagakerjaan, seperti membentuk Dinas Tenaga Kerja dan Balai Latihan Kerja (BLK). Sedangkan **hambatan** dalam pencapaian kinerja berupa BLK masih belum dilaksanakan pengisian struktural sehingga

menghambat peningkatan ketrampilan masyarakat pencari kerja di tambah lagi dengan pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. **Solusi** untuk meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan kedepannya melalui peningkatan SDM dan sarana prasarana ketenagakerjaan.

3.1.5.8. Sasaran 8 : Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Sasaran 8 yaitu menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu; (1) Nilai SAKIP;(2) LPPD dan (3) Opini BPK. Adapun hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut.

Tabel 3. 16 Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 8

Sasaran 8	Indikator Kinerja	2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	B (65,58)	Belum Rilis	
	Nilai LPPD	Sangat Tinggi (3,1930)	Belum Rilis	
	Opini BPK	WTP	WTP	100

Selanjutnya analisis capaian pada masing-masing indikator kinerja dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1) Indikator Kinerja Sasaran SAKIP

Sampai dengan Laporan ini disusun belum dirilis nilai SAKIP Tahun 2020. Adapun Perolehan nilai SAKIP Pemerintah Kota Bima Tahun 2019 sebesar 67,05 dengan predikat kategori nilai baik (B).

2) Indikator Sasaran LPPD

LPPD merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Sampai dengan laporan ini disusun Hasil Evaluasi EKPPD Tahun 2019 belum dirilis,.

3) Indikator Sasaran Opini BPK

Opini BPKP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memenuhi kriteria antara lain :

- a) Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- b) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Daerah atas pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik.
- c) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping ketiga kriteria utama tersebut LKPD yang disajikan harus didukung dengan bukti-bukti audit yang mencukupi, tidak terdapat ketidakpastian dan kesalahan yang cukup berarti (*no material uncertainties*), pengelolaan atas *Cash flow* dikontrol dengan baik, dan pengelolaan atas aset daerah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap. Artinya, laporan keuangan yang disajikan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang material.

Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan NTB terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Bima yang dikeluarkan pada Tahun 2020 merupakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Bima Tahun 2019 diperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sehingga sesuai dengan target. Status opini dari BPK terhadap hasil pemeriksaan LKPD Kota Bima menandakan semakin baiknya pengelolaan keuangan pemerintah Kota Bima dari tahun ke tahun. Adapun pencapaian opini BPK terhadap LKPD Tahun 2014-2020 dapat dilihat pada tabel 3.17 berikut.

Tabel 3. 17 Pencapaian Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Kota Bima Tahun 2014-2020

Tahun	Predikat	Nilai	Capaian Kinerja (%)
-------	----------	-------	---------------------

2014	WTP	WTP	100
2015	WTP	WTP	100
2016	WTP	WTP	100
2017	WTP	WTP	100
2018	WTP	WTP	100
2019	WTP	WTP	100

sumber : *Inspektorat Kota Bima*

Pemerintah Kota Bima meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian sejak Tahun 2014 sampai dengan sekarang. Dengan demikian target RPJMD sampai Tahun 2020 telah tercapai 100%. Faktor yang mendukung capaian hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kota Bima adalah sebagai berikut :

- 1) Komitmen yang sangat tinggi kepala daerah dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Bima dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah ke arah yang lebih baik;
- 2) Pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan LKPD bekerja sama dengan BPKP perwakilan NTB;
- 3) Pengelolaan keuangan dan aset daerah didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi SIMDA dan SIMBADA.

Adapun upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima untuk meningkatkan capaian kinerja opini hasil

pemeriksaan BPK atas LKPD Kota Bima pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1) Memperbaiki kelemahan sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- 2) Memperbaiki pengelolaan Aset Daerah;
- 3) Memperbaiki sistem penganggaran dan realisasi belanja, agar tidak terjadi salah penganggaran dan salah realisasi belanja;
- 4) Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja opini pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan, yaitu :

- 1) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capai kinerja dan keuangan, dengan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan;
- 2) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

3.1.5.9. Sasaran 9 : Meningkatnya kemandirian keuangan

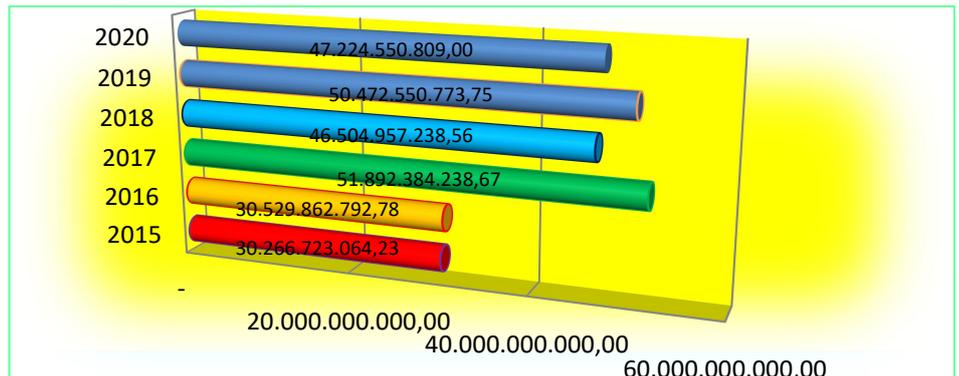
Sasaran 9 yaitu meningkatnya kemandirian keuangan, diukur dengan indikator kinerja rasio PAD terhadap APBD.

Pada Tahun 2020 Pemerintah Kota Bima memperoleh PAD sebesar Rp. 47.224.550.809, atau 6,41 % dari APBD sebesar Rp. 736.298.044.130,13. Bahwa terjadi peningkatan Rasio PAD terhadap APBD sebesar 0,46% Tahun 2019 hanya 5,58% sedangkan Rasio PAD terhadap APBD Tahun 2020 sebesar 6,14 %. Berdasarkan PAD tersebut, maka capaian kinerja Pemerintah Kota Bima untuk indikator kinerja sasaran Rasio PAD terhadap APBD yaitu sebesar 89,20 %. Untuk analisis pencapaian kinerja Sasaran 9 dapat dilihat pada tabel 3.18 berikut.

Tabel 3. 18 Analisis Pencapaian Indikator Sasaran 9

Sasaran 9	Indikator Kinerja	2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya kemandirian keuangan	Rasio PAD terhadap APBD	6	6,41	89,20

Hasil perolehan tersebut mencerminkan kinerja Pemerintah Kota Bima dalam meningkatkan PAD dalam kondisi belum terlalu baik, sebagaimana terlihat pada grafik 3.12 berikut ini.



Grafik 3. 12 Perolehan PAD Pemerintah Kota Bima Tahun 2015-2020

Adapun Jumlah Perolehan PAD Tahun 2015-2020 dapat terlihat pada tabel 3.19 berikut.

Tabel 3. 19 PAD Pemerintah Kota Bima Tahun 2015 - 2020

Tahun	PAD
2015	30.266.723.064,23
2016	30.529.862.792,78
2017	51.892.384.238,67
2018	46.504.957.238,56
2019	50.472.550.773,75
2020	47.224.550.809,00

Faktor pendukung pencapaian kinerja karena adanya peningkatan komitmen petugas dalam mengamankan kebocoran penerimaan PAD, sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** berupa masih lemah sistem dan sarana prasarana pelayanan sehingga menghambat transparansi penerimaan dan Pandemi COVID-19 yang masih melanda seluruh dunia termasuk Kota Bima sangat berdampak pada beberapa sumber PAD Kota Bima. **Solusi** untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada penerimaan PAD lingkup Pemerintah Kota Bima melalui identifikasi potensi sumber PAD pada

sektor-sektor potensial dan penerapan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi dalam pengelolaan PAD.

3.1.5.10. Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mengukur sasaran 10 : meningkatnya kualitas pelayanan publik, diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat. Pelaksanaan pengukuran ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R I Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Bima Tahun 2020 sebesar 82,61 dengan predikat baik. Atas perolehan tersebut, maka Pemerintah Kota Bima telah berhasil mencapai target kinerja sebesar 103,26 % dari target RPJMD sebesar 80,00. Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran 10 dapat dilihat tabel 3.20 berikut.

Tabel 3. 20 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 10

Sasaran 10	Indikator Kinerja	Tahun 20120		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	Rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) lingkup Pemerintah Kota Bima	B (80,00)	B (82,61)	103,26

Adapun hasil pengukuran nilai IKM pada masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik lingkup Pemerintah Kota Bima tersaji pada tabel 3.21 berikut ini.

Tabel 3. 21 Pengukuran IKM pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Perangkat Daerah/Unit	IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Layanan
1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP	90,53	A	Sangat Baik
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	93,30	A	Sangat Baik
3. Dinas Pertanian	81,42	B	Baik
4. Dinas Kelautan dan Perikanan	80,77	B	Baik
5. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	82,22	B	Baik
6. Dinas Sosial	79,80	B	Baik
7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	81,70	B	Baik
8. Dinas Pariwisata	73,08	C	Kurang baik
9. Dinas Tenaga kerja	93,85	A	Sangat Baik
10. RSUD	80,66	B	Baik
11. Puskesmas Rasanae Timur	84,53	A	Sangat Baik
12. Puskesmas Mpunda	74,93	C	Kurang Baik
13. Puskesmas Penanae	83,64	A	Sangat Baik
14. Puskesmas Paruga	79,09	B	Baik
Rata-Rata IKM	82,61	B	Baik

Secara umum perolehan IKM pada unit penyelenggara pelayanan publik rata-rata memperoleh kategori “**Baik**”. Hal ini cukup menggembirakan mengingat Pemerintah Kota Bima termasuk daerah otonom yang baru dibentuk sejak Tahun 2020. Adapun persentase kategori Perangkat Daerah/Unit,

antara lain ; (1) Sangat baik sebanyak 5 unit atau 35,71 %;(2) Baik sebanyak 7 Unit atau 50,00 %;(3) Cukup baik sebanyak 2 unit atau 14,29 %.

Faktor-faktor pendukung pencapaian sasaran adalah adanya Kemitraan dan koordinasi dengan Dinas/badan teknis terkait; tersedianya Sumber Daya Pegawai yang cukup memadai; tersedianya sarana dan prasarana pendukung. Selain itu faktor pendukung lainnya, dipengaruhi oleh semakin membaiknya penyiapan pada standar pelayanan publik, baik persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya, produk, kompetensi, perilaku pelayanan, maklumat pelayanan, dan penanganan pengaduan, sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** berupa masih belum memiliki aplikasi pelayanan online. **Solusi** untuk meningkatkan pelayanan publik di Pemerintah Kota Bima yaitu dengan membuat inovasi layanan berbasis online.

3.1.5.11. Sasaran 11 : Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang

Untuk mengukur sasaran 11 : meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang, diukur dengan indikator kinerja indeks kesesuaian tata ruang. Indeks kesesuaian tata ruang pada Tahun 2020 sebesar 98,1. Berdasarkan perolehan tersebut, maka Pemerintah Kota Bima pada Tahun 2020 telah

mampu mencapai kinerja sebesar 103,26 % dari target RPJMD sebesar 95. Untuk rincian analisis capaian kinerja dapat dilihat pada tabel 3.25 berikut.

Tabel 3. 22 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 11

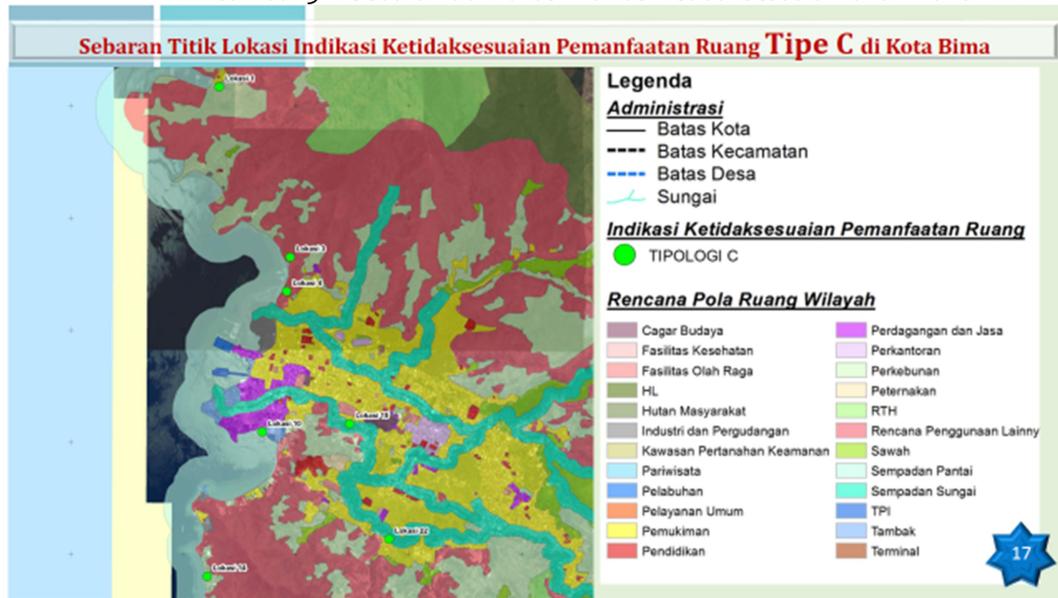
Sasaran 11	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Indeks kesesuaian tata ruang	95	98,1	103,6

Berdasarkan analisis data bahwa indeks kesesuaian tata ruang Kota Bima sebesar 98,1, sedangkan yang mengalami ketidaksesuaian sebesar 1,9, sebagaimana rinciannya terlihat pada gambar 3.1 dan 3.2 berikut.

Gambar 3. 1 Indikasi ketidaksesuaian lahan Tahun 2020



Gambar 3. 2 Sebaran titik lokasi indikasi ketidaksesuaian lahan Tahun 2020



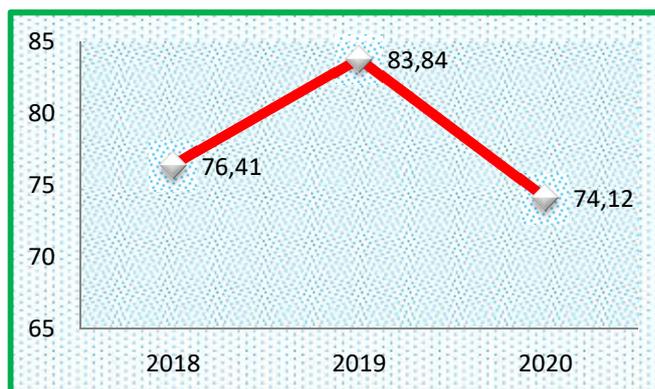
3.1.5.12. Sasaran 12 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Untuk mengukur sasaran 12 : meningkatnya kualitas lingkungan hidup, diukur dengan indikator kinerja indeks kualitas lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup di Kota Bima pada Tahun 2020 sebesar 74,12 dengan kategori baik. Berdasarkan perolehan tersebut, maka Pemerintah Kota Bima pada Tahun 2020 telah mampu mencapai kinerja sebesar 148,25 % dari target RPJMD sebesar 50. Untuk rincian analisis capaian kinerja sasaran 12 dapat dilihat pada tabel 3.23 berikut.

Tabel 3. 23 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 12

Sasaran 12	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	50	74,123	148,25

Jika dibandingkan dengan IKLH Tahun 2019, maka IKLH Kota Bima pada Tahun 2020 mengalami Penurunan sebesar 9,72 namun terjadi penurunan pada Tahun 2020 sebagaimana terlihat grafik 3.13 berikut.



Grafik 3. 13 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2018-2020

Faktor pendukung pencapaian sasaran 12 yaitu adanya Program pada Dinas Lingkungan Hidup, meliputi Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. **Faktor penghambat** bahwa adanya air limbah permukiman masih belum optimal. **Solusinya**

diperlukan program pendampingan penanganan sampah skala lingkungan.

3.1.5.13. Sasaran 13 : Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman

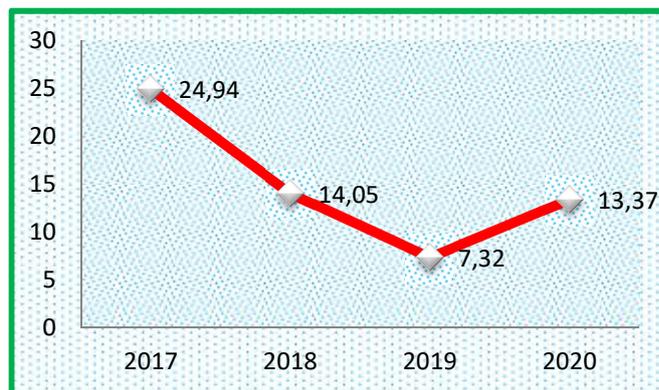
Sasaran 13 yaitu meningkatnya kualitas kawasan permukiman, diukur dengan indikator kinerja Persentase luas kawasan kumuh. Persentase luas kawasan kumuh di Kota Bima pada Tahun 2020 sebesar 166,49 Ha atau 13,37 % dari seluruh kawasan kumuh di Kota Bima. Pada Tahun 2020 bahwa peningkatan luas kawasan kumuh di Kota Bima sebesar 82,67 Ha. Atas keadaan tersebut, maka Pemerintah Kota Bima telah mampu mencapai kinerja sebesar 54 % dari target RPJMD sebesar 7,22. Untuk rincian analisis capaian kinerja sasaran 13 dapat dilihat pada tabel 3.24 berikut.

Tabel 3. 24 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 13

Sasaran 13	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan kumuh	7,22	13,37	54

Selanjutnya luas kawasan kumuh di Kota Bima secara berangsur setiap tahunnya terus berkurang. Selama kurun waktu 4 tahun terakhir Pemerintah Kota Bima telah mampu

mengurangi luas kawasan kumuh sebanyak 226,19 Ha atau 72 %, Namun pada Tahun 2020 terjadi peningkatan kawasan kumuh dimana 90% merupakan kawasan kumuh dengan kategori kumuh ringan. Perubahan Luas Kawasan Kumus selama 4 tahun dapat terlihat grafik 3.14 dan Tabel 3.25 berikut.



Grafik 3. 14 Luas Kawasan Kumuh di Kota Bima Tahun 2017-2020

Tabel 3. 25 Capaian Pengurangan Kawasan Kumuh Tahun 2017-2020

Tahun	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Luas Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh (%)	Persentase Penurunan (%)
(1)	(2)	(3)	(4=2/3x100)	5
2017	310,01	1.245	24,94	-
2018	174,98	1.245	14,05	10,89
2019	83,82	1.245	7,32	6,73
2020	166,49	1.245	13,37	(6,64)

Sumber: Kutipan SK Kumuh Nomor: 188.45/583/650/IX/2020 tanggal 8 September 2020

Faktor pendukung pencapaian sasaran 13 yaitu adanya Program Perencanaan Pemukiman Kumuh melalui kegiatan Pendampingan Perencanaan dan Penanganan Kumuh Kota Bima melalui Pokja PKP dan (Kotaku). **Faktor penghambat**

bahwa penanganan sampah permukiman dan penanganan air limbah permukiman sebagai bagian dari upaya terintegrasi mengatasi kekumuhan, masih memerlukan upaya lebih dalam mengurangi kawasan kumuh. **Solusinya** diperlukan upaya terintegrasi penanganan air limbah permukiman dan pengurangan kekumuhan di Kota Bima.

3.1.5.14. Sasaran 14 : Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah

Untuk mengukur sasaran 14 : meningkatnya kualitas infrastruktur daerah, diukur dengan indikator kinerja persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik. Persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik Kota Bima sebesar 2,8 %. Berdasarkan perolehan tersebut, maka Pemerintah Kota Bima Tahun 2020 mampu mencapai kinerja sebesar 56,25 % dari target RPJMD sebesar 5 %. Untuk rincian analisis capaian kinerja sasaran 14 dapat dilihat pada tabel 3.26 berikut.

Tabel 3. 26 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 14

Sasaran 14	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik	5	2,8	56,25

Jika dibandingkan dengan Tahun 2019, maka persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik di Kota Bima pada Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 2,8 sebagaimana terlihat tabel 3.27 berikut.

Tabel 3. 27 Perbandingan kualitas infrastruktur di Kota Bima Tahun 2018-2019

Uraian	Tahun 2019		Tahun 2020	
	Panjang	%	Panjang	%
Saluran Drainase (m)	114.369	46,14	122.530,80	49,43
Jalan (m)	188.210	72,92	189.780	73,53
Jaringan Irigasi Tekhnis (m)	29.835	64,2	31.783,39	68,39
Total	332.414	183,26	344.094,19	191,35
Rata-Rata	110.804,67	61,09	114.698,06	63,78
Pertumbuhan				2,8

Faktor pendukung pencapaian sasaran 14 yaitu adanya keterpaduan pendanaan kegiatan baik yang bersumber dari APBD, APBN maupun dari lembaga non pemerintah lainnya. **Faktor penghambat** bahwa masih banyaknya jalan di Kota Bima yang belum memiliki status sehingga apabila diterbitkan SK status jalan baru maka akan menambah panjang jalan Kota dengan kondisi yang belum baik. Disamping itu, kerusakan infrastruktur akibat bencana banjir bandang Tahun 2016 yang lalu belum sepenuhnya mampu diperbaiki. **Solusinya** diperlukan peningkatan kualitas kemitraan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah dalam pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Bima.

3.1.5.15. Sasaran 15 : Meningkatnya Ketahanan terhadap Bencana

Untuk mengukur sasaran 15 : meningkatnya ketahanan terhadap bencana, diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu indeks ketahanan daerah. Indeks ketahanan daerah Kota Bima Tahun 2020 sebesar 74. Atas perolehan tersebut, maka Pemerintah Kota Bima telah berhasil mencapai target kinerja sebesar 87,06 % dari target RPJMD sebesar 80. Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran 15 dapat dilihat tabel 3.28 berikut.

Tabel 3. 28 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 15

Sasaran 15	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	85	74	87,06

jika dibanding Tahun 2019, maka Indeks ketahanan daerah pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 10 poin, Adapun rinciannya tersaji pada tabel 3.29 berikut dibawah ini:

Tabel 3. 29 Analisis Pencapaian Prioritas Indeks Ketahanan Daerah

Prioritas Penilaian Indeks Ketahanan Daerah	Capaian (%)	
	2019	2020
1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan	99	67
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu	100	20
3. Pengembangan sistem informasi,	98	67

diklat dan logistik		
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana	90	67
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	76	83
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	75	76
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana	95	91
Rata-rata	84	74

Berdasarkan analisis terhadap 7 prioritas penilaian indeks ketahanan daerah bahwa hanya pada prioritas 7 mendapat persentase diatas 90% sedangkan prioritas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 masih mendapat porsentase dibawah 80 terutama prioritas 2 . Faktor penyebab capaian prioritas belum optimal, diantaranya; (1) beberapa dokumen pendukung untuk kajian resiko dan perencanaan terpadu belum bisa diperbaharui dengan adanya pandemi COVID-19, (2) masih Lemahnya penegakan hukum (khususnya terhadap *illegal logging*) dan belum optimalnya bangunan penahan gelombang tsunami, belum terlaksananya revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota; dan (2) poin 6 adalah belum ada penyusunan rencana kontigensi (renkon) tsunami, sistem peringatan dini tsunami, rencana evakuasi bencana tsunami, renkon karhut, sistem peringatan dini karhut, renkon erupsi gunung merapi, sistem peringatan dini bencana erupsi gunung api, infrastrukutr

evakuasi bencana gunung api, renkon kekeringan, dan sistem peringatan dini kekeringan.

Faktor-faktor pendukung pencapaian sasaran 15 yaitu adanya PUSDALOPS yang telah terintegrasi dengan pusat, sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** berupa perlunya penyelarasan semua dokumen yang mendukung pengkajian resiko dan perencanaan terpadu dan masih belum optimalnya pencegahan dan mitigasi bencana maupun kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana. **Solusi** untuk kedepannya berusaha meningkatkan program mitigasi dan kesiapsiagaan bencana dan segera menyusun kembali Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan diintegrasikan dengan dokumen RPJMD.

3.1.5.16. Sasaran 16 : Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban

Untuk mengukur sasaran 16 : meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban, diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu Persentase penurunan Angka kriminalitas. Persentase penurunan Angka kriminalitas Kota Bima Tahun 2020 sebesar -66,3 persen dibanding Tahun 2019. Atas perolehan tersebut, maka Pemerintah Kota Bima telah memperoleh kinerja sebesar -22,62 dari target RPJMD sebesar

15. Analisis pencapaian indikator kinerja sasaran 16 dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 3. 30 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran 16

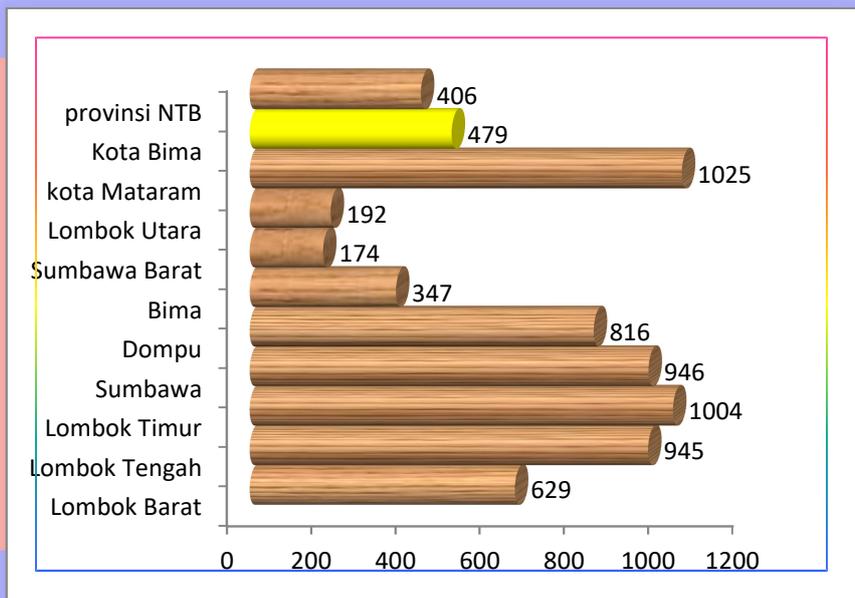
Sasaran 16	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
		Target	Realisasi	
Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban	Persentase penurunan Angka kriminalitas	15	-66,3	-22,62

Jika dibandingkan dengan angka kriminalitas pada Tahun 2019 maka telah terjadi Peningkatan angka kriminalitas pada Tahun 2020 sebesar 151 kasus, sebagaimana yang terlihat pada tabel 3.31 berikut.

Tabel 3. 31 Persentase Penurunan Angka Kriminalitas

Kasus Kriminalitas	Jumah Kasus		Penurunan	
	2019	2020	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5)
Angka Kriminalitas	288	479	-151	-66,7

Jika dibandingkan dengan angka kriminalitas yang ada di Kabupaten/Kota lainnya di NTB bahwa jumlah angka kriminalitas di Kota Bima masih termasuk kategori terendah keempat setelah Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Utara serta Kabupaten Bima, sebagaimana terlihat pada grafik berikut.



Grafik 3. 15 Perbandingan angka kriminalitas Kota Bima dengan Kabupaten/Kota dan Provinsi NTB Tahun 2020

Angka kriminalitas di Kota Bima setiap tahunnya terus mengalami penurunan walaupun Tahun 2020 mengalami kenaikan hal ini disebabkan oleh adanya COVID-19.



Grafik 3. 16 Angka Kriminalitas Kota Bima Tahun 2016-2020

Faktor-faktor pendukung pencapaian sasaran 15 yaitu adanya intervensi program yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan terbentuknya forum-forum

seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Konflik Sosial (FPK) yang ikut mendukung penurunan angka kriminalitas dan konflik sosial di Kota Bima, sedangkan **hambatan dalam pencapaian kinerja** berupa masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam pencegahan tindakan criminal. **Solusi** untuk kedepannya berusaha meningkatkan program pencegahan konflik sosial dan kriminalitas.

3.2. Realisasi Keuangan

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun 2020 sebesar Rp. 736.298.044.130,13 dengan realisasi sebesar Rp. 715.383.787.682,95 atau 97,16 %. Analisis capaian sasaran dengan rata-rata capaian indikator 72,14 % dengan kategori Cukup Berhasil dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 20.914.256.447,14.- atau 2,84%, sehingga pencapaian sasaran tersebut dapat dikategorikan kurang efektif dan efisien. Analisis efektifitas dan efisiensi persasaran dapat dilihat pada pada tabel 3.32 .

Tabel 3. 32 Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Pencapaian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja 2020			Anggaran 2020			Ket.
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran	Realisasi	% realisasi	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka	69,75	70,38	100,9	83.025.924.700	76.956.218.281	92,69 %	Efisien
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	10,64	12,75	119,78	44.089.146.258	43.432.924.726	98,51 %	Efisien
3	Meningkatnya Daya Beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	Rp.000 / bulan	1.300	1.366,74	105,13	1.416.768.650	1.361.207.200	96,08 %	Efisien
4	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan harapan	Angka	85,7	85,7	100	1.506.629.926	1.262.684.525	83,81 %	Efisien
5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB	%	6,19	-4,95	-79,97	26.236.947.018	25.372.678.398	96,71 %	
6	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	8,6	8,35	102,99	9.287.352.232	8.295.770.000	89,32 %	Efisien
7	Meningkatnya kesempatan kerja	Angka Pengangguran terbuka	%	1	4,42	22,62	677.513.525	670.039.200	98,90 %	
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Huruf dan Angka	BB (70,01)	belum rilis		38.875.914.777	37.431.504.320	96,28 %	Efisien
		Skor LPPD	Angka	Sangat Tinggi (3,2000)	belum rilis					
		Opini BPK	Huruf	WTP	WTP	100				
9	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio PAD terhadap APBD	%	7%	5,70%	79,27	6.149.328.674	5.880.001.800	95,62 %	
10	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	B (80,00)	82,61	103,26	18.248.125.396	17.443.671.671	95,59 %	Efisien
11	Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Indeks Kesesuaian Tata Ruang	%	95	98,1	103,26	5.494.505.518	3.997.344.600	72,75 %	Efisien
12	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	50	74,12	148,25	11.979.804.875	11.930.777.502	99,59 %	Efisien
13	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Luas kawasan kumuh	%	2,64	13,37	19,75	39.220.683.963	32.698.999.673	83,37 %	
14	Meningkatnya	Persentase	%	5%	2,80%	56,25	25.137.627.110	25.063.270.670	99,70 %	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja 2020			Anggaran 2020			Ket.
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran	Realisasi	% realisasi	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14
	kualitas infrastruktur daerah	peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik								
15	Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	85	74	87,06	38.129.685.462	36.653.636.815	96,13 %	
16	Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban	Persentase penurunan Angka kriminalitas	%	15	-104,1	-14,41	7.064.676.610	6.918.799.000	97,94 %	

Adapun Realisasi Anggaran perprogram pada Tahun 2020 dapat dilihat dan tabel 3.33 berikut

Tabel 3.33 Realisasi Program dan Anggaran Tahun 2020

PROGRAM		ANGGARAN	REALISAI	%
1		2	3	4
Sasaran 1: Meningkatnya derajat masyarakat		83.025.924.700	76.956.218.281	92,69%
1	Program upaya kesehatan masyarakat	3.224.850.302	2.660.269.500	82,49%
2	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1.039.166.096	930.980.673	89,59%
3	Program pengendalian penyakit tidak menular	150.226.000	92.198.000	61,37%
4	Program standarisasi pelayanan kesehatan	27.717.132.697	26.449.379.086	95,43%
5	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	15.397.479.588	14.735.246.371	95,70%
6	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	21.990.564.423	18.369.803.926	83,53%
7	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1.403.888.515	876.572.500	62,44%
8	pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan KB	1.233.991.731	1.176.221.000	95,32%
9	Program keluarga berencana	805.561.400	796.012.450	98,81%
10	peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	382.955.000	231.717.500	60,51%
11	Program peningkatan kualitas hidup dan	87.448.000	87.448.000	100,00%

PROGRAM		ANGGARAN	REALISAI	%
1		2	3	4
	perlindungan perempuan			
12	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	477.241.875	421.384.275	88,30%
13	Program obat dan perbekalan kesehatan	2.280.904.014	2.107.632.000	92,40%
14	Program bina kesehatan masyarakat	6.110.463.682	7.334.231.000	120,03%
15	Program pelayanan kesehatan penunjang	230.097.077	218.412.000	94,92%
16	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	493.954.300	468.710.000	94,89%
Sasaran 2: Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan		44.089.146.258	43.432.924.726	98,51%
1	Program pendidikan anak usia dini	5.992.629.106	5.876.088.000	98,06%
2	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	36.819.468.452	36.390.584.026	98,84%
3	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan	288.724.500	271.920.500	94,18%
4	program pendidikan non formal	80.225.000	70.225.000	87,54%
5	program manajemen pelayanan pendidikan	736.142.000	653.467.000	88,77%
6	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	171.957.200	170.640.200	99,23%
Sasaran 3: Meningkatnya daya beli masyarakat		1.416.768.650	1.361.207.200	96,08%
1	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	175.495.300	163.279.500	93,04%
2	Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil menengah	371.780.100	359.330.000	96,65%
3	Program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan	25.990.000	25.990.000	100,00%
4	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	70.036.185	69.851.285	99,74%
5	Program peningkatan produksi perkebunan	269.743.300	262.489.500	97,31%
6	Program peningkatan produksi tanaman hortikultura	503.723.765	480.266.915	95,34%
Sasaran 4: Meningkatnya ketahanan pangan		1.506.629.926	1.262.684.525	83,81%
1	Program peningkatan ketahanan pangan	261.557.600	260.970.300	99,78%
2	Program peningkatan pemasaran hasil produk pertanian/perkebunan	470.007.025	439.824.125	93,58%
3	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	775.065.301	561.890.100	72,50%
Sasaran 5 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi		26.236.947.018	25.372.678.398	96,71%
1	Program pengembangan budidaya perikanan	763.106.142	752.108.550	98,56%
2	Program pengembangan perikanan tangkap	2.432.937.851	2.366.191.250	97,26%
3	Program pengembangan pemasaran pariwisata	1.610.166.367	1.093.185.000	67,89%
4	Program pengembangan industri dan	81.528.000	80.966.000	99,31%

PROGRAM		ANGGARAN	REALISAI	%
1		2	3	4
	kemitraan pariwisata			
6	Program peningkatan produksi hasil peternakan	2.564.305.600	2.500.920.000	97,53%
7	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	1.733.511.560	1.666.637.600	96,14%
8	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	1.960.683.000	1.934.925.000	98,69%
9	Program peningkatan realisasi dan kerjasama investasi	94.977.300	93.652.300	98,60%
10	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investsi	107.237.700	107.237.700	100,00%
11	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	14.888.493.498	14.776.854.998	99,25%
Sasaran 6 : Meningkatkan kualitas hidup PMKS		9.287.352.232	8.295.770.000	89,32%
1	Program pemberdayaan fakir miskin	1.576.309.000	908.244.000	57,62%
2	Program pelayanan dan rehabilitas kesejahteraan sosial	498.566.000	490.976.500	98,48%
3	program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	498.566.000	490.976.500	98,48%
4	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	194.960.000	112.972.500	57,95%
5	Program perlindungan dan jaminan sosial	440.934.150	399.958.500	90,71%
6	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	1.465.840.519	1.464.966.400	99,94%
7	Program pengembangan perumahan	4.612.176.563	4.427.675.600	96,00%
Sasaran 7 : Meningkatkan kesempatan kerja		677.513.525	670.039.200	98,90%
1	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	357.060.825	355.781.600	99,64%
2	Program peningkatan kesempatan kerja	135.800.200	130.741.600	96,27%
3	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	184.652.500	183.516.000	
Sasaran 8 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintah daerah		38.875.914.777	37.431.504.320	96,28%
1	Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota	805.434.875	804.200.875	99,85%
2	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh	1.658.328.597	1.656.583.000	99,89%
3	Program peningkatan profesiaonalisme tenga pemeriksa dan aparatur pengawasan	244.117.872	231.544.172	94,85%
4	program penelitian dan pengembangan daerah	941.501.379	799.933.750	84,96%
5	program perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan sosial	751.398.606	688.226.000	91,59%

PROGRAM		ANGGARAN	REALISAI	%
1		2	3	4
6	program perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan infrastruktur	2.602.879.347	2.272.777.000	87,32%
7	program pengendalian perencanaan daerah	1.230.363.688	1.164.439.750	94,64%
8	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	5.509.704.912	5.429.474.379	98,54%
9	Program peningkatan pengelolaan aset/barang milik daerah	1.195.674.871	1.162.116.600	97,19%
10	program peningkatan pengendalian tata kelola keuangan	1.270.428.966	1.198.190.000	94,31%
11	program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	916.349.314	893.212.314	97,48%
12	Program peningkatan kompetensi aparatur	659.292.900	582.635.000	88,37%
13	Program pembangunan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian kota bima	185.615.200	154.366.000	83,16%
14	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	1.071.997.095	1.011.241.950	94,33%
15	Program pelayanan administrasi kepegawaian	371.682.800	370.601.500	99,71%
16	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	316.025.192	309.999.000	98,09%
17	Program pengadaan perangkat aplikasi dan telematika	9.133.769.873	9.026.262.000	98,82%
18	Program keamanan informasi pemerintah daerah	273.940.618	244.088.500	89,10%
19	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	5.705.782.028	5.519.050.933	96,73%
20	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4.031.626.644	3.912.561.597	97,05%
Sasaran 9 : Meningkatnya kemandirian keuangan daerah		6.149.328.674	5.880.001.800	95,62%
1	Program peningkatan pengelolaan pendapatan daerah	1.199.663.543	1.183.322.100	98,64%
2	Program pencapaian dan akuntabilitas pendapatan daerah	1.435.977.822	1.407.800.700	98,04%
3	program optimalisasi layanan parkir dan jasa terminal	473.980.000	457.090.000	96,44%
4	Program pengembangan destinasi pariwisata	3.039.707.309	2.831.789.000	93,16%
Sasaran 10 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik		18.248.125.396	17.443.671.671	95,59%
1	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	15.397.479.588	14.735.246.371	95,70%
2	Program penatan administrasi kependudukan	1.574.196.538	1.452.742.800	92,28%
3	Program peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informatika	876.461.770	861.710.000	98,32%

PROGRAM		ANGGARAN	REALISAI	%
1		2	3	4
4	program peningkatan kualitas pelayanan informasi, pengaduan dan pengembangan pelayanan	199.627.500	198.092.500	99,23%
5	Program peningkatan kualitas pelayanan dan perizinan	200.360.000	195.880.000	97,76%
Sasaran 11 : Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang		5.494.505.518	3.997.344.600	72,75%
1	Program perencanaan tata ruang	625.255.860	609.869.030	97,54%
2	Program pemanfaatan ruang	198.587.248	177.397.500	89,33%
3	Program pengendalian pemanfaatan tata ruang	265.100.000	217.025.000	81,87%
4	Program pengembangan kawasan	21.577.000	21.575.000	99,99%
5	Program penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan	4.383.985.410	2.971.478.070	67,78%
Sasaran 12 : meningkatnya kualitas lingkungan hidup		11.979.804.875	11.930.777.502	99,59%
1	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	183.330.271	179.315.000	97,81%
2	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	547.913.500	546.620.000	99,76%
3	program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	109.035.000	108.785.000	99,77%
4	program peningkatan pengendalian polusi	53.285.000	53.110.000	99,67%
5	program pengelolaan areal pemakaman	2.106.016.000	2.103.420.000	99,88%
6	program peningkatan sarana dan prasarana pertamanan	2.068.433.300	2.060.680.600	99,63%
7	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan lainnya	914.963.000	902.960.000	98,69%
8	Program pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong	5.996.828.804	5.975.886.902	99,65%
Sasaran 13 : meningkatnya kualitas kawasan permukiman		39.220.683.963	36.811.964.673	93,86%
1	Program pengembangan lingkungan sehat	142.830.250	100.670.0000	70,48%
2	Program pembangunan turap/talud/brongjong	4.017.970.000	4.012.295.000	99,86%
3	Program pengembangan kinerja pengembangan air minum dan air limbah	12.417.042.363	12.088.753.223	97,36%
4	Program pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	18.887.512.400	16.947.142.400	89,73%
5	Program perencanaan permukiman kumuh	267.590.000	264.510.000	98,85%
6	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	3.487.738.950	3.398.594.050	97,44%

PROGRAM		ANGGARAN	REALISAI	%
1		2	3	4
Sasaran 14 : Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah		25.137.627.110	25.063.270.670	99,70%
1	Program peningkatan jalan & jembatan	2.677.339.100	2.674.933.100	99,91%
2	Program rehabilitas/pemeliharaan jalan dan jembatan	6.663.245.380	6.662.968.380	100,00%
3	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	8.885.047.896	8.872.631.370	99,86%
4	Program peningkatan sarana dan prasarana penerangan jalan,taman dan hutan kota	6.783.269.735	6.724.012.820	99,13%
5	program peningkatan sarana dan prasarana keselamatan transportasi	128.725.000	128.725.000	100,00%
Sasaran 15 : Meningkatnya ketahanan terhadap bencana		38.129.685.462	36.653.636.815	96,13%
1	Program pembangunan turap/talud/brongjong	4.017.970.000	4.012.295.000	99,86%
2	program kesiapsiagaan dan peringatan dini	232.610.627	230.281.800	99,00%
3	Program peningkatan pelayanan kedaruratan dan logistik	502.916.400	502.648.400	99,95%
4	Program rehabilitas dan rekonstruksi	31.660.263.735	30.297.272.715	95,69%
5	program mitigasi dan pencegahan	590.892.100	568.212.100	96,16%
6	program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1.125.032.600	1.042.926.800	92,70%
Sasaran 16 : Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban		7.064.676.610	6.918.799.000	97,94%
1	program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.234.557.600	1.227.753.800	99,45%
2	program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	362.366.000	340.195.000	93,88%
3	program penegakan perda	2.332.447.010	2.244.577.800	96,23%
4	Program pengembangan wawasan kebangsaan	358.428.000	351.482.000	98,06%
5	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	2.776.878.000	2.754.790.400	99,20%
		356.540.634.693	339.482.493.381	95,22%



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kota Bima Tahun 2020 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan Pemerintah yang baik (*Good Governance*). Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja bahwa rata-rata kinerja Pemerintah Kota Bima sebesar 72,24 % atau telah mencapai kategori Sedang. Untuk mendapatkan Keberhasilan capaian kinerja yang lebih baik perlu didukung adanya kerja sama yang sinergis dari seluruh jajaran Perangkat Daerah dan pihak-pihak yang terkait

terutama dengan kondisi Pandemi Covid -19 yang masih melanda Kota Bima.

Pencapaian kinerja Pemerintah Kota Bima Tahun 2020 menunjukkan keberhasilan pada sebagian Sasaran dalam memenuhi target tahunan sesuai RPJMD 2018-2023 sebagaimana telah dilaksanakan pengukuran pada 16 (sebelas) sasaran dan 18 indikator kinerja. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Pemerintah Kota Bima dapat dinyatakan sangat tinggi sebanyak 9 sasaran (56,25 %), Tinggi sebanyak 2 Sasaran (12,5%), Rendah sebanyak 1 sasaran (6,25%) dan Sangat Rendah sebanyak 4 sasaran (25 %).

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kota Bima juga didukung dengan adanya alokasi APBD Pemerintah Kota Bima Tahun 2020. Menurunnya capaian kinerja Tahun 2020 tidak terlepas dari Kondisi Daerah yang masih belum bisa keluar dari Zona Merah Covid-19 sehingga menghambat tercapainnya sasaran konerja. Adapun adanya target yang masih kurang pencapaiannya Pemerintah Kota Bima akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit untuk perbaikan penanganan di masa mendatang. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bima Tahun 2020 kami sampaikan dan atas kerjasama serta dukungan seluruh pihak disampaikan ucapan terima kasih.



BAGIAN ORGANISASI

*Jl. Soekarno Hatta No.2, Kota Bima - NTB
Tlp. 0374.646441 - 646442, Fax. 0374. 646441*